

**ANALISIS PENERAPAN *CUSTOMER DUE DILIGENCE* TERHADAP  
PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DALAM  
PERSEPEKTIF EKONOMI ISLAM PADA BANK  
PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH  
(BPRS) BANDAR LAMPUNG**

**Skripsi**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas – Tugas dan Memenuhi Syarat –  
Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1 dalam Ilmu Ekonomi dan  
Bisnis Islam.**

**Oleh**

**LARASWATI**

**NPM. 1651020567**

**Jurusan : Perbankan Syariah**



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1442 H/2020 M**

**ANALISIS PENERAPAN *CUSTOMER DUE DILIGENCE* TERHADAP  
PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DALAM  
PERSEPEKTIF EKONOMI ISLAM PADA BANK  
PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH  
(BPRS) BANDAR LAMPUNG**

**Skripsi**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas – Tugas dan Memenuhi Syarat –  
Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1 dalam Ilmu Ekonomi  
dan Bisnis Islam.**

**Oleh**

**Laraswati**

**NPM. 1651020567**

**Jurusan : Perbankan Syariah**

**Pembimbing I : Prof. Dr. Tulus Suryanto, M.M, Akt.C.A  
Pembimbing II : M. Yusuf Bahtiar, M.E**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
144 H/2020**

## ABSTRAK

*Customer Due Diligence* atau uji tuntas nasabah adalah kegiatan identifikasi verifikasi dan pemantauan yang dilakukan oleh bank sebagai Penyedia Jasa Keuangan (PJK) untuk memastikan transaksi sesuai dengan profil, karakteristik, dan/atau pola transaksi calon nasabah atau WIC. *Customer Due Diligence* merupakan bagian dari kebijakan dan prosedur Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT) yang bertujuan untuk mencegah terjadinya tindakan pencucian uang dan pendanaan terorisme, peraturan tentang kewajiban bagi PJK khususnya bank untuk menerapkan CDD termuat dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 12/20/PBI/2010 Tentang Program APU dan PPT.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : bagaimana kebijakan prosedur dan mekanisme *penerapan customer due diligence* terhadap tindak pidana pencucian uang pada BPRS Bandar Lampung dan bagaimana penerapan *customer due diligence* terhadap tindak pidana pencucian uang dalam persepektif ekonomi islam pada BPRS Bandar Lampung. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kebijakan prosedur serta mekanisme penerapan *customer due diligence* terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bandar Lampung dalam persepektif ekonomi islam.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan desain penelitian deskriptif kualitatif. Partisipan dan tempat dalam penelitian ini adalah jumlah karyawan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bandar Lampung sebanyak 32 karyawan dengan 5 orang karyawan BPRS Bandar Lampung yang menjadi narasumber yang meliputi direktur, kepala bagian oprasional, *customer service*, teller, serta pengawas internal. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan cara observasi, wawancara, dokumentasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan prosedur dan mekanisme penerapan *customer due diligence* terhadap tindak pidana pencucian uang pada BPRS Bandar Lampung telah dilakukan dengan cukup baik yang dibuktikan dengan tidak ada kasus pencucian uang pada BPRS Bandar Lampung dan penerapan CDD sesuai dengan peraturan yang dikeluarkan oleh Bank Inonesia yakni Nomor 12/20/PBI/2010, yang meliputi identifikasi, verifikasi, pengkinian dan pemantauan terhadap transaksi yang dilakukan oleh nasabah. Selain itu Penerapan CDD terhadap Tindak Pidana pencucian uang di BPRS Bandar Lampung dilakukan sejalan dengan prinsip – prinsip ekonomi islam dan Al – Qur'an dan hadis yakni karena CDD merupakan alat yang digunakan untuk mencegah tindak pidana pencucian uang, yang dimana pencucian uang merupakan tindakan yang dilarang dalam islam karenan dapat menurunkan masalah dan sulit untuk tercapainya falah, dan dapat menimbulkan resiko bagi bank sehingga dengan adanya CDD bank dapat mencegah resiko tersebut agar terpenuhi kemaslahatan dan tercapainya falah.

Kata kunci : *Customer Due Diligence*, Tindak Pidana Pencucian Uang, Ekonomi islam

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Laraswati

NPM : 1651020567

Jurusan/Prodi : Perbankan Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Analisis Penerapan Customer Due Diligence Terhadap Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Persepektif Ekonomi Islam Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bandar Lampung”** adalah benar – benar merupakan hasil karya penyusunan sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujukdan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, aka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung,



Laraswati

1651020567





**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

*Jln. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp. (0721) 780887-703531*

**PERSETUJUAN**

**Judul Skripsi : ANALISIS PENERAPAN CUSTOMER DUE DILIGENCE TERHADAP PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DALAM PERSEPEKTIF EKONOMI ISLAM PADA BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH (BPRS) BANDAR LAMPUNG**

**Nama Mahasiswa : Laraswati  
NPM : 1651020567  
Program Studi : Perbankan Syariah  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam**

**MENYETUJUI**

Untuk dimunaqasahkan dan dipertahankan dalam sidang munaqasah  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung

**Pembimbing I**

**Prof. Tulus Survano M.M., Akt.C.A**  
**NIP. 19700926008011008**

**Pembimbing II**

**M. Yusuf Bahtiar, M.E**  
**NIP. 198912082011001**

**Mengetahui,  
Ketua Prodi Perbankan Syariah**

**Dr. Erike Anggraeni, M.E.Sy**  
**NIP. 198208082011012009**





**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

*Jln. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp.  
(0721) 780887-703531*

**PENGESAHAN**

**Skripsi yang berjudul "ANALISIS PENERAPAN CUSTOMER DUE  
DILIGENCE TERHADAP TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG  
DALAM PERSEPEKTIF EKONOMI ISLAM PADA BANK  
PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH (BPRS) BANDAR LAMPUNG"**

disusun oleh Nama: **Laraswati**, NPM : **1651020567**, Jurusan **Perbankan  
Syariah**, telah diujikan dalam sidang munaqasah Fakultas Ekonomi Dan  
Bisnis Islam pada hari/tanggal: .....

**TIM DEWAN PENGUJI**

**Ketua Sidang : Dr. Ruslan Abdul Ghofur, M.S.I**

(.....)

**Sekretaris : Rahmat Fajar Ramdani, S.E., M.Si.**

(.....)

**Penguji I : Any Eliza, S.E., M.Ak**

(.....)

**Penguji II : Prof. Tulus Suryanto, M.M., Akt., C.A**

(.....)

Mengetahui,



**Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam**

**Dr. Ruslan Abdul Ghofur, M.S.I**

NIP. 09008012003121001



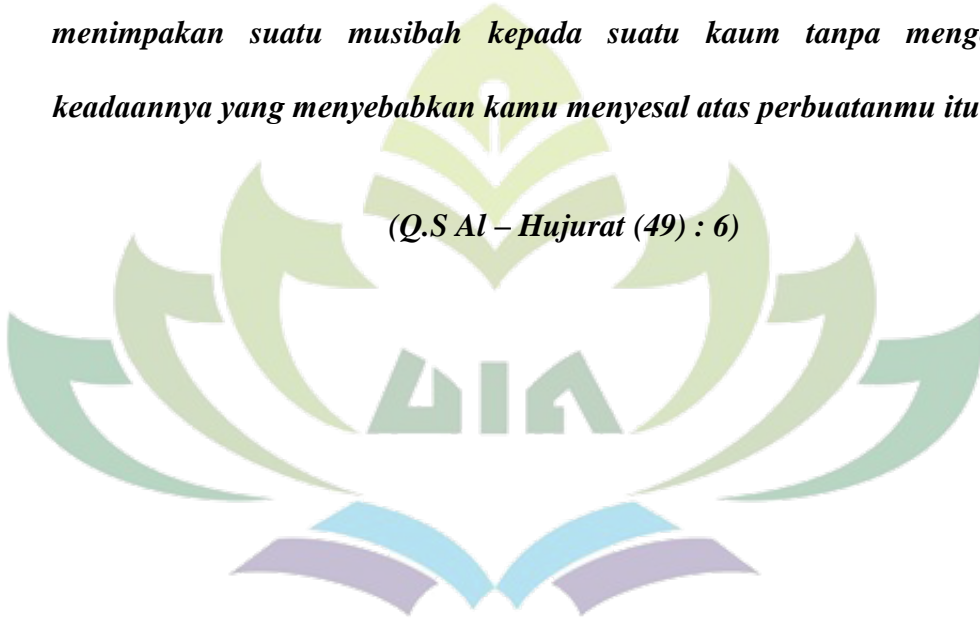
## MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا مَّجْهَلَةً

فَتُصِيبُوهَا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ ﴿٦﴾

*“Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang Fasik membawa suatu berita, Maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu”.*

*(Q.S Al – Hujurat (49) : 6)*



## **PERSEMBAHAN**

Dengan mengucapkan Alhamdulillah dan penuh rasa syukur kepada Allah SWT sehingga memberi kekuatan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Dengan segala kerendahan hati dan penuh kebahagiaan, skripsi ini penulis persembahkan sebagai tanda cinta, dan terima kasih mendalam kepada:

1. Kedua orang tua yang sangat saya cintai Bapak Mingan dan ibu Wismaniah, yang sangat sayangi dan saya cintai karena Allah. Sungguh begitu ikhlas dengan cucuran kerinngatnya, merawat, membesarkan, memberi pengajaran hidup yang luar biasa dan karena merekalah motivator terbaik sepanjang sejarah kehidupan saya untuk terus berproses menjadi lebih baik. Semoga selalu dalam lindungan Allah SWT dan keberkahan dalam setiap langkahnya.
2. Keluargaku tersayang, Saudari perempuan yang sangat saya cintai Ayu windarwati yang selalu mendoakan ku, memotivasiku, memberikan senyum semangat yang sangat berarti bagiku dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Almamaterku tercinta, tempatku menimba ilmu-ilmu pengetahuan, semoga selalu membawa keberkahan, UIN Raden Intan Lampung, semoga semakin sukses, berkualitas dan selalu berjaya.



## **RIWAYAT HIDUP**

Penulis bernama lengkap Laraswati, lahir pada tanggal 26 juni 1998 di Trimurjo Lampung Tengah, penulis merupakan anak ke dua dari dua bersaudara dari Bapak Mingan dan Ibu Wismaniah, berikut daftar riwayat pendidikan penulis

1. SD Negeri 1 Serigeni Baru, Kayuagung, Ogan Komering Ilir, Sumatra Selatan, tahun 2004 - 2010
2. SMP Negeri 6 Kayuagung, Ogan Komering Ilir, Sumatra Selatan, tahun 2010 - 2013
3. SMA Negeri 2 Kayuagung, Ogan Komering Ilir, Sumatra Selatan, tahun 2013 – 2016.
4. Pada tahun 2016 penulis melanjutkan pendidikan strata satu (S1) di Universitas Islam Negeri Raden Lampung, dengan konsentrasil program studi Perbankan Syariah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.

## KATA PENGANTAR

*Assalamualaikum warahmatullahi wabarokatuh.*

Alhamdulillah Puji Syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan Nikmat iman dan islam juga memberikan karuniaNya berupa ilmu pengetahuan, kesehatan, dan petunjuk, sehingga skripsi dengan judul **“Analisis Penerapan Customer Due Diligence Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Persepektif Ekonomi Islam Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (Bprs) Bandar Lampung”** dapat diselesaikan. Sholawat serta salam disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, juga kepada keluarganya, pada sahabat dan pengikut-pengikutnya, semoga diberikan keistiqomahan untuk menjalankan sunnah dan mengikuti ajarannya dan kelak mendapatkan syafa’atnya.

Skripsi ini ditulis sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi program strata satu (S1), Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Raden Intan Lampung. Penulis menyadari dan menghargai bantuan semua pihak dalam proses penyelesaian skripsi ini, tidak lupa penulis ucapkan terima kasih sedalam-dalamnya. Ungkapan terima kasih ini disampaikan kepada yang terhormat:

1. Bapak Dr. Ruslan Abdul Ghofur, M.S.I selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang senantiasa ramah dan tanggap terhadap kesulitan mahasiswa
2. Ibu Dr.Erike Anggraeni M.E.Sy selaku Ketua Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan



Lampung yang telah membimbing kami selama proses akademik berlangsung sehingga kami dapat menyelesaikan program studi perbankan syariah dengan baik.

3. Bapak Prof Tulus Suryanto M.M.,Akt.C.A selaku Dosen Pembimbing I dan bapak M.Yusuf Bahtiar M.E selaku Dosen Pembimbing II, yang selalu dapat meluangkan waktu untuk membimbing dan mengarahkan serta memberikan motivasi kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
4. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang telah memberikan ilmu dan pelajaran kepada penulis selama masa perkuliahan.
5. Lembaga keuangan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bandar Lampung beserta karyawan BPRS Bandar Lampung Khususnya para narasumber Bapak Marsono selaku Direktur BPRS, dan Ibu Rosmila Pragesti selaku Kepala Bagian Oprasional, Ibu Fitri Wahyuni selaku Customer Service, Ibu Putri Deli Suciati selaku Pengawas Internal dan Ibu Misnawarita selaku Teller.
6. Orangtua yang saya cintai bapak mingan dan ibu wismaniah, serta ssaudari perempuan saya ayu windarwati yang slalu memberikan dukungan semangat dan doa.
7. Saudara laki – laki persepupuan yang saya sayangi aldi wijaya yang selalu memberi saya semangat dan mendukung saya.
8. Kakak Ahmad Kholili, S.E. yang selalu memberikan arahan tentang cara penulisan skripsi ini dengan support dan doanya.

9. Sahabat ku tersayang Taufik, Nanda Aulia Zahara, Indra Majid, Reza Novitasari, Final Rifaldi, yang selalu memberikan semangat serta motivasi sampai dengan terselesaikannya skripsi ini.
10. Teman – teman kelas H Perbankan Syariah angkatan 2016 terimakasih banyak atas dukungan semangat serta motivasi dan kebersamaan selama masa perkuliahan kita.
11. Terimakasih kepada BTS (Bangtan Sonyeondan) sebuah grup penyanyi favorit saya yang beranggotakan Kim Namjoon, Kim Seok Jin, Min Yoon Gi, Jung Ho Seok, Park Jimin, Kim Taehyung, Jeon Jeong Guk, karena karya lagu dan musik kalian yang memberi saya semangat dan motivasi.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata kesempurnaan, Untuk itu pembaca sekiranya dapat memberikan kritik dan saran guna melengkapi tulisan ini.

Semoga karya tulis ini dapat menjadi referensi atas pengembangan ilmu pengetahuan khususnya bagi ilmu – ilmu Perbankan Syariah.

Bandar Lampung , Oktober 2020

**LARASWATI**  
**1651020567**



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>iii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>v</b>
<b>PENGESAHAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vii</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>viii</b>
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xvi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Penegasan Judul .....	1
B. Alasan Memilih Judul .....	2
C. Latar Belakang .....	3
D. Fokus Penelitian .....	12
E. Rumusan Masalah .....	12
F. Tujuan Penelitian .....	13
G. Manfaat Penelitian .....	13
H. Metode Penelitian.....	14
<b>BAB II KAJIAN TEORI</b>	
A. Manajemen Resiko Bank Syariah .....	26
1. Pengertian Manajemen Resiko Bank Syariah .....	26
2. Tujuan Manajemen Resiko Bank Syariah.....	26
3. Jenis – Jenis Resiko Bank Syariah .....	27
B. Transaksi Keuangan Mencurigakan.....	29

C. Kebijakan Pelaksanaan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT) .....	31
1. Program APU PPT .....	31
2. Penerapan Program APU PPT .....	34
3. Penilaian atas Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah Terkait dengan Undang – Undang Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.....	41
4. Pengenaan Sanksi atas Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah terkait Undang – Undang tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.....	44
D. Customer Due Diligence .....	45
1. Pengertian <i>Customer Due Diligence</i> .....	46
2. Dasar Hukum Penerapan <i>Customer Due Diligence</i> .....	47
3. Pelaksanaan <i>Customer Due Diligence</i> .....	48
4. <i>Customer Due Diligence</i> Lebih Sederhana .....	68
5. <i>Customer Due Diligence</i> Oleh Pihak Ketiga .....	69
6. <i>Customer Due Diligence</i> dalam Ekonomi Islam .....	71
E. Tindak Pidana Pencucian Uang .....	79
1. Pengertian Tindak Pidana Pencucian Uang .....	79
2. Objek Tindak Pidana Pencucian Uang.....	80
3. Dasar Hukum Tindak pidana pencucian uang .....	81
4. Karakteristik tindak pidana pencucian uang .....	82
5. Metode Pencucian Uang .....	83
6. Tahapan pencucian Uang .....	84
7. Dampak Tindak Pidana Pencucian Uang .....	86
8. Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang .....	87
9. Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Ekonomi Islam .....	91
F. Sistem dan Prinsip Etika Bisnis Islam.....	92
1. Sistem Etika Bisnis Islam.....	92
2. Prinsip – Prinsip Etika Bisnis Islam.....	92
G. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).....	95



1. Pengertian Bank Perkreditan Rakyat Syariah.....	95
2. Dasar Hukum Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.....	97
3. Tujuan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.....	98
4. Fungsi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah .....	99
5. Akad Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.....	100
H. Tinjauan Pustaka .....	102

### **BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN**

A. Gambaran Umum Objek Penelitian .....	108
1. Sejarah BPRS Bandar Lampung .....	108
2. Identitas Perusahaan.....	112
3. Visi, Misi dan Komitmen.....	112
4. Susunan Pengurus .....	113
5. Perizinan BPRS Bandar Lampung.....	114
6. Kegiatan Usaha BPRS Bandar Lampung.....	114
7. Struktur Organisasi BPRS Bandar Lampung.....	114
8. Produk-produk BPRS Bandar Lampung.....	117
9. Profil Keuangan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bandar Lampung (BPRS Bandar Lampung) .....	119
10. Prestasi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bandar Lampung (BPRS Bandar Lampung).....	120
B. Prosedur Kebijakan dan Mekanisme <i>Customer Due Diligence</i> Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bandar Lampung.....	122
C. Penerapan <i>Customer Due Diligence</i> terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Perspektif Ekonomi Islam pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bandar Lampung .....	157

### **BAB IV ANALISIS PENELITIAN**

A. Prosedur Kebijakan dan Mekanisme <i>Customer Due Diligence</i> Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bandar Lampung.....	161
--	-----

B. Penerapan <i>Customer Due Diligence</i> terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Persepektif Ekonomi Islam pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bandar Lampung .....	171
--	-----

## **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	180
B. Rekomendasi .....	182

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **DAFTAR TABEL**

## **DAFTAR GAMBAR**

## **DAFTAR LAMPIRAN**



## BAB I PENDAHULUAN

### A. Penegasan Judul

Judul Skripsi ini adalah “ **Analisis Penerapan *Customer Due Diligence* Terhadap Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Persepektif Ekonomi Islam Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bandar Lampung** ” Sebelum menguraikan lebih lanjut pembahasan dalam skripsi ini, dan menghindari kekeliruan oleh pembaca ada baiknya untuk mengetahui maksud dan tujuan serta istilah – istilah yang dalam skripsi ini. Adapun istilah dalam skripsi ini yaitu :

1. Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa ( karangan, perbuatan, dsb) untuk mengetahui keadaan sebenarnya ( sebab, musabab, duduk perkaranya, dsb)<sup>1</sup>
2. *Customer Due Diligence* (CDD) atau uji tuntas nasabah adalah kegiatan berupa identifikasi, verifikasi, dan pemantauan yang dilakukan oleh bank sebagai Penyedia Jasa Keuangan (PJK) untuk memastikan transaksi sesuai dengan profil, karakteristik, dan/atau pola transaksi calon nasabah, nasabah, atau WIC (Walk in Customers).<sup>2</sup>
3. Tindakan pencucian uang merupakan tindakan pemilik uang untuk membersihkan uangnya yang merupakan hasil dari suatu tindakan yang

---

<sup>1</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama,2011) cet 1,h.58

<sup>2</sup>Eko Prakoso Johannes, “*Customer Due Diligence Dalam Mencegah Tindak Pidana Pencucian Uang*”, *Law Review*, Volume XIX No 1, 2019,h.85



melanggar hukum dengan cara menginvestasikan atau menyimpan di bank.<sup>3</sup>

4. Perbankan Syariah suatu lembaga keuangan yang berfungsi sebagai penyimpan dan penyalur dana para nasabah, dimana dalam menjalankan kegiatannya harus sesuai dengan ketentuan syariah.<sup>4</sup>
5. Ekonomi Islam adalah ilmu yang mempelajari usaha manusia untuk mengalokasikan dan mengelola sumber daya untuk mencapai falah berdasarkan pada prinsip – prinsip dan nilai – nilai Al – qur'an dan Sunnah.<sup>5</sup>

## **B. Alasan Memilih Judul**

Adapun alasan peneliti memilih judul penelitian ini sebagai berikut :

1. Secara objektif

Dalam penelitian ini penulis meneliti tentang penerapan *Customer Due Diligence* terhadap tindak pidana pencucian uang pada Perbankan syariah di Indonesia. Perbankan dalam sistemnya yang menerapkan prinsip kehati – hatian dalam melaksanakan kegiatannya. Berkaitan dengan hal ini *customer due diligence* merupakan salah satu proses untuk mengidentifikasi nasabah tentang identitas nasabah secara menyeluruh serta transaksi yang dilakukan nasabah dan memantau transaksi nasabah untuk mengurangi resiko dalam kegiatan usaha perbankan khususnya pada

---

<sup>3</sup> Muhamad Djumhana, "*Hukum Perbankan di Indonesia*", Citra Aditya Bakti(Bandung : Citra Aditya Bakti ), 2012, h.529

<sup>4</sup>Muhammad, "*Manajemen Dana Bank Syariah*"( Jakarta: PT RajaGrafindo Persada,2014) h. 2

<sup>5</sup> Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) Universitas Islam Indonesia Yogyakarta atas kerjasama dengan Bank Indonesia, "*Ekonomi Islam*", (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada,2013), h 19

perbankan syariah. Dalam penelitian ini penerapan CDD dan EDD terkait dengan tindak pidana pencucian uang guna mengetahui penerapan secara maksimal terhadap proses pencegahan serta transaksi yang mencurigakan pada perbankan syariah.

## 2. Secara subjektif

Adapun alasan secara subjektif dalam penelitian ini yaitu judul yang peneliti ajukan memiliki referensi pendukung yang dapat mempermudah penyelesaian skripsi seperti artikel, jurnal, dan skripsi pada penelitian terdahulu. Selain itu judul yang diajukan sesuai dengan disiplin ilmu yang penulis miliki sebagai mahasiswa prodi Perbankan Syariah. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.

### **C. Latar Belakang Masalah**

Perkembangan zaman pada era globalisasi dengan kemajuan teknologi yang canggih memberi manfaat yang besar terhadap kemudahan dalam bertransaksi. Terutama transaksi keuangan yang pada saat ini era revolusi 4.0 yang semua kegiatan dapat menggunakan teknologi digital yang mampu mengefisiensi waktu dalam bertransaksi yang biasanya harus dengan bertatap muka dan saat ini dapat dilakukan dengan suatu aplikasi. Kemudahan yang ditawarkan oleh perkembangan kemajuan teknologi berdampak pula pada kemajuan perekonomian yang berbasis teknologi.

Perkembangan sistem ekonomi dalam bertransaksi tentu diperlukannya sebuah lembaga yang menaungi serta mengatur sistem transaksi khususnya dalam transaksi keuangan. Atas dasar hal tersebut pada saat ini lembaga

keuangan khususnya perbankan yang turut serta dalam mengatur transaksi keuangan yang mempermudah dalam kegiatan ekonomi.

Menurut undang – undang No. 10 tahun 1998, Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk – bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat banyak.<sup>6</sup>

Lembaga keuangan bank dalam fungsinya sebagai financial intermediary, yaitu sebagai perantara antara pihak-pihak yang mempunyai kelebihan dana (*surplus of funds*) dengan pihak-pihak yang kekurangan dana (*lack of funds*), juga sebagai agen pembayaran memegang peranan yang sangat penting dalam kehidupan ekonomi suatu bangsa.<sup>7</sup>

Kehadiran dari jasa perbankan tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat modern dewasa ini, karena hampir seluruh kegiatan ekonomi yang dilakukan anggota masyarakat akan bersinggungan dengan layanan jasa perbankan. Dalam pelaksanaan kegiatannya bank terbagi dalam beberapa jenis yang salah satu nya yaitu bank umum. Bank umum adalah bank yang dapat memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bank umum dapat mengkhususkan diri untuk melaksanakan kegiatan tertentu atau memberikan perhatian yang lebih besar kepada kegiatan tertentu.<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup>Veithzal Rivai, et. al. “*Commercial Bank Management Manajemen Perbankan Dari Teori ke Praktik.*” (Jakarta : Rajawali Pers), 2013, h.1

<sup>7</sup>Rykar G.B Pakpahan “ *Implementasi Prinsip Customer Due Diligence Pada Oprasional Bank Umum Sebagai Upaya Pencegahan Tindak Kejahatan Pencucian Uang di Indonesia*”, ( Tesis Program Ilmu Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta, 2012) h.8

<sup>8</sup>Op. Cit. h.2

Di Indonesia terdapat dua macam Bank Umum yakni bank umum konvensional dan bank umum syariah. Perbankan Syariah, menurut Sutan Remy telah ditetapkan bahwa bank – bank syariah Indonesia, yang terdiri atas bank yang sepenuhnya melaksanakan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah.<sup>9</sup> Pada pasal 1 UU No 21 tahun 2008 tentang ketentuan bank umum disebutkan pengertian bank pembiayaan syariah (BPRS) adalah bank syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. pengguna BPRS seluruh Indonesia dapat di tunjukan pada table berikut.

**Tabel 1.1**

**Bank Pembiayaan Rakyat Syariah**

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah		
Tahun	Jumlah Institusi	Jumlah Kantor
2018	167	495

*Sumber : Otoritas Jasa Keuangan*

Banyak nya masyarakat yang menggunakan layanan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah sampai pada tahun 2018 berjumlah 167 institusi dengan 495 kantor BPRS di seluruh Indonesia.

---

<sup>9</sup> Khotibul Umam, Setiawan Budi Utomo, “ *Perbankan Syariah Dasar – Dasar dan Dinamika Perkembangan di Indonesia* “, (Jakarta : Rajawali Pers ), 2017, h.78



**Tabel 1.2**  
**Komposisi DPK Bank pembiayaan rakyat Syariah**

Komposisi DPK Bank Pembiayaan Rakyat Syariah				
Indikator	2016	2017	2018	2019
Giro akad wadiah	-	-	-	-
Tabungan	2.161.305	2.578.278	2.998.201	3.202.792
a. Akad wadiah	1.178.603	1.457.999	1.738.702	1.873.868
b. Akad mudharabah	982.702	1.120.278	1.259.499	1.328.924
Deposito Akad Mudharabah	3.662.658	4.409.003	5.136.737	5.529.098
a. 1 bulan	461.386	549.304	538.766	392.842
b. 3 bulan	506.445	730.517	782.724	634.705
c. 6 bulan	723.491	777.670	901.025	731.535
d. 12 bulan	1.947.335	2.329.815	2.880.772	2.812.410
e. >12 bulan	24.001	21.695	33.449	957.605
<b>Total</b>	<b>5.823.964</b>	<b>6.987.280</b>	<b>8.134.938</b>	<b>8.731.890</b>

Sumber : Statistik Perbankan Syariah, OJK.

Berdasarkan data diatas bahwasanya total Dana Pihak Ketiga pada Tabungan dan Deposito pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yakni menjadi Rp 8.731.890. Dengan adanya peningkatan ini membuktikan bahwa produk pada BPRS juga banyak diminati masyarakat dan layanannya digunakan oleh masyarakat. Semakin meningkat jumlah pengguna layanan BPRS dapat memicu terjadinya tindak pidana pencucian uang. Dan dapat menimbulkan Berbagai resiko pada lembaga perbankan itu sendiri. Atas dasar tersebut diperlukan Penerapan Program Anti

Pencucian uang dimana di dalam nya terdapat penerapan customer due diligence guna mengidentifikasi nasabah yang mencurigakan.

**Tabel 1.3**  
**Laporan Pemegang saham BPRS Bandar Lampung**  
**Periode desember 2019**

Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris, dan Anggota DPS BPRS	Pemegang Saham	Pemegang saham Pengendali (Ya/Tidak)
<b>DIREKSI</b> 1. Ridwansyah S.E.,M.E.Sy 2. Marsono S.E.	1. Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung (85%) 2. Indra Syarif S.T (9.50%) 3. Ir. Rachmat Abdullah (0,70%)	Ya  Tidak  Tidak
<b>DEWAN KOMISARIS</b> 1. A Rahman Mustafa S.E.,M.M.,Ak. 2. Yusran Effendi S.E, M.M.	4. PT. Permodalan Nasional Madani (0,70%) 5. Drs. Edy Sutrisno M.Pd (0,70%) 6. Bank Muamalat Indonesia Tbk (0,50%) 7. Drs. H. Suwardi Romli (0,30%)	Tidak  Tidak  Tidak  Tidak
<b>DEWAN PENGAWAS SYARIAH</b> 1. Ismail Sholeh S.Hi 2. Syamsul Hilal S.Ag.,M.Ag.	8. Ny. Hj. Sri Adiati Ali Yamun (0,30%) 9. H. Achmad Fatoni (0,20%) 10. Lainnya (2,10%)	Tidak  Tidak  Tidak

*Sumber : Otoritas Jasa Keuangan*

Berdasarkan data pemegang saham diatas pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bandar Lampung, pemegang saham BPRS terbesar dimiliki oleh

Pemerintah Kota Bandar Lampung sebanyak 85% dengan keterangan sebagai pemegang saham pengendali, serta aset BPRS pada akhir desember 2019 tercatat sebesar Rp 105.471.869 , berdasarkan hal ini tentu dapat memicu terjadinya tindak pidana pencucian uang oleh para pemegang saham terbesar yang dimana pemerintah daerah kota Bandar Lampung dapat tergolong sebagai PEP (Politically Exposed Person) yaitu para pejabat pemerintah daerah, dan dalam hal ini perlunya penerpan pencegahan tindak pidana pencucian uang dengan menggunakan Customer Due Diligence (CDD).

Kriminalisasi pencucian uang terdapat dalam pasal 3 Undang – Undang No. 25 Tahun 2003 Tentang TTPU. Rumusan Pasal 3 berkaitan dengan rumusan pasal 1 angka 1. Pencucian uang adalah perbuatan menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, menukarkan, atau perbuatan lainnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dengan maksud untuk menyembunyikan, atau menyamarkan, asal – usul harta kekayaan sehingga seolah – olah harta kekayaan yang sah.<sup>10</sup>

Tindak pidana pencucian uang merupakan bagian dari tindak pidana ekonomi. Pelaku tindak pidana ekonomi pada umumnya mereka yang mempunyai status sosial menengah ke atas dalam masyarakat, bersikap dan bertingkah laku seperti intelektual yang lazimnya di kenal dengan “*white collar*

---

<sup>10</sup>Undang No. 25 Tahun 2003 Tentang TTPU, Pasal 3 angka 1

*crime*” ( pelaku tindak pidana kerah putih), misalnya pelaku ini menggunakan bank untuk memutihkan keuntungannya yang di peroleh dari tindak pidana.<sup>11</sup>

Islam memiliki konsep yang jelas dalam mengajarkan soal harta, asal harta yang didapatkan dan pendistribusian harta. Islam memiliki ketentuan dalam mendapatkan harta yang benar dan sah, yaitu tidak terdapat unsur al-batil dan az-zalim (QS Al-Baqarah (2) : 188).

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْخُلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾

*“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui”*. (QS. Al-Baqoroh:188)

Dimana al-batil dan az-zalim yakni jalan yang salah, penindasan, dan eksploitasi, yang sering kali berbentuk penipuan, pencurian, dan perampokan. Oleh karenanya, menjadi sebuah kepastian bahwa Islam melarang pemerolehan harta yang tidak benar dan melanggar ketentuan hukum Islam. Namun seiring berkembangnya waktu, tindak pidana terhadap harta terus berkembang dengan menggunakan istilah-istilah yang baru, termasuk di dalamnya; money laundering, money politic, dll.<sup>12</sup>

Menjelang akhir tahun 2018, jumlah penyampaian laporan ke Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) terus bertambah.

<sup>11</sup> Marulak Pardede “ *Hukum Pidana Bank*” (Jakarta : Pustaka Sinar Harapan), 1995, h. 123

<sup>12</sup> Sumadi, “*Telaah kasus Pencucian Uang dalam Tinjauan Sistem Ekonomi Syariah*”, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, Volume 3 No 3, 2017, h 190



Penerimaan pelaporan terbanyak selama november 2018 terutama terkait LTKL (swift bank), LTKT, LTKM, dan LTPJB yakni masing – masing bertambah banyak 411,6 ribu LTKL (Laporan Transfer dana dari/ke Luar Negeri), 219,3 ribu LTKT (Laporan Transaksi Keuangan Tunai), 4,5 ribu LTKM (Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan), serta 2,7 ribu LTPBJ (Laporan dari Penyedia Barang dan Jasa).<sup>13</sup>

Dampak dari pencucian adalah hilangnya pendapatan negara dari sumber pembayaran pajak. Pencucian uang menghilangkan pendapatan pajak pemerintah dan demikian secara tidak langsung merugikan para pembayar pajak yang jujur. Hal demikian mengakibatkan pengumpulan pajak oleh pemerintah makin sulit. Dampak lainya yaitu merongrong sektor bisnis swasta yang sah, merongrong integritas pasarpasar keuangan, mengakibatkan hilangnya kendali pemerintah terhadap kebijakan ekonominya, dan timbulnya distorsi dan ketidakstabilan ekonomi.<sup>14</sup> Perbankan yang menerapkan prinsip kehati – hatian yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, yang merupakan cara perbankan untuk mencegah terjadinya upaya tindakan pencucian uang. Cara efektif selanjutnya dalam upaya pencegahan tindak pidana pencucian uang yaitu prinsip Mengenal Nasabah Bank (Know How Your Customer) yakni prinsip yang diterapkan bank untuk mengenal dan mengetahui identitas nasabah, memantau kegiatan transaksi nasabah termasuk

---

<sup>13</sup> [www.ppatk.go.id](http://www.ppatk.go.id), diakses pada 5 maret 2020, pukul 09.43

<sup>14</sup> Iwan Kurniawan, " *Perkembangan Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering) dan Dampaknya terhadap Sektor Ekonomi dan Bisnis*", Jurnal Ilmu Hukum, Vol 3 No 1, h 14

melaporkan setiap transaksi yang mencurigakan. Prinsip mengenal nasabah diatur dalam Peraturan Bank Indonesia No 3/10/PBI/2001 tentang penerapan prinsip mengenal nasabah.<sup>15</sup>

Pemerintah dan Bank Indonesia membuat peraturan terkait dengan program anti pencucian uang untuk mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang yang memanfaatkan jasa perbankan. Dibuatlah Undang – Undang No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Peraturan tersebut diantaranya memuat prinsip mengenali pengguna jasa *Customer Due Dilligence* (CDD) yang kemudian diperluas oleh Bank Indonesia dengan prinsip *Enhanced Due Dilligence* (EDD) pada Peraturan Bank Indonesia No.12/20/PBI/2010 tentang Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.<sup>16</sup> *Customer Due Diligence* (CDD) atau uji tuntas nasabah adalah kegiatan berupa identifikasi, verifikasi, dan pemantauan yang dilakukan oleh bank sebagai Penyedia Jasa Keuangan (PJK) untuk memastikan transaksi sesuai dengan profil, karakteristik, dan/atau pola transaksi calon nasabah, nasabah, atau WIC (Walk in Customers).<sup>17</sup>

#### **D. Fokus Penelitian**

<sup>15</sup> Suryadi M Sahara “ *Prinsip Kehati – hatian dan Prinsip Mengenal Nasabah Sebagai Upaya Perbankan Mencegah Tindak Pidana Pencucian Uang*”, Jurnal Lex Et Socitatis Vol. 4 No 10, 2018, h 95.

<sup>16</sup> Satrio Sakti Nugroho, “ *Implementasi Customer Due Diligence dan Enhanced Due Diligence dalam Mencegah Tindak Pidana Pencucian Uang*”, Jurnal Hukum Universitas Negeri Semarang, Vol 3 No 1, 2014, h 49

<sup>17</sup> Eko Prakoso Johannes, “*Customer Due Diligence Dalam Mencegah Tindak Pidana Pencucian Uang*”, Law Review, Volume XIX No 1, 2019, h.79

Peneliti kualitatif dalam menetapkan fokus penelitian. Menurut Spardley menyatakan bahwa “ *A focused refer to a single cultural domain or a few related domain.*”, maksudnya adalah bahwa fokus itu merupakan domain tunggal atau beberapa domain terkait dari situasi sosial<sup>18</sup>. Dalam penelitian ini fokus penelitiannya yaitu penerapan prinsip kehati – hatian perbankan dalam mencegah tindak pidana pencucian uang dimana prinsip ini dapat dilakukan dengan cara yang efektif yang telah dimuat dalam undang – undang No. 8 tahun 2010 dan Peraturan Bank Indonesia 12/20/PBI/2010 yaitu tentang Penerapan Customer Due Diligence dan Enhanced Due Diligence sebagai sarana efektif pencegahan tindak pidana pencucian uang pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Subjek yang diteliti yaitu para pegawai perbankan khususnya yang terkait dengan pengelolaan penerapan terkait fungsi kepatuhan bank atau penerapan CDD dan EDD. Objek yang akan diteliti adalah BPRS Bandar Lampung.

#### **E. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat dirumuskan permasalahan yang akan di pecahkan dalam penelitian ini :

1. Bagaimana Prosedur kebijakan dan mekanisme Penerapan Customer Due Diligence terhadap Pencegahan Tindakan Pencucian Uang pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bandar Lampung?

---

<sup>18</sup>Sugiono “ *Penelitian Kuantitatif dan kualitatif dan R & D* “, (Bandung : Alfabeta), 2018, h. 209

2. Bagaimana penerapan Customer Due Diligence terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Persepektif Ekonomi Islam pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bandar Lampung?

#### **F. Tujuan Penelitian.**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian yaitu :

1. Untuk mengetahui prosedur kebijakan dan mekanisme penerapan *Customer Due Diligence* telah sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku dan peraturan lain yang berlaku, pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bandar Lampung.
2. Untuk mengetahui penerapan *Customer Due Diligence* terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Persepektif Ekonomi Islam pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bandar Lampung

#### **G. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat secara teoritis

Secara teoritis manfaat penelitian, dalam penulisan penelitian ini adalah dapat menjadi tambahan literatur dan referensi serta tambahan ilmu pengetahuan oleh pembaca dan penulis. Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat menjadi sumber referensi utama dalam membuat penelitian yang lebih baik nantinya, dan menjadi sumber pemikiran dalam menambah pengetahuan.

2. Manfaat secara praktis.



a. Bagi pihak bank

Memberi informasi dan masukan bagi pihak pengelola bank syariah tentang cara mencegah tindak pidana pencucian uang dengan menerapkan prinsip *customer due diligence* dalam praktiknya. Serta informasi mengenai mekanisme penerapan pada bank syariah itu sendiri.

b. Bagi Penulis

Menambah pengetahuan serta wawasan yang luas terhadap masalah yang diteliti terhadap semua aspek yang terdapat di dalamnya yang berhubungan dengan penerapan prinsip *customer due diligence* sebagai cara pencegahan tindak pidana pencucian uang.

c. Bagi pihak lainya

Sebagai informasi tambahan serta referensi bagi pihak pembaca serta referensi bagi peneliti lainya yang membutuhkannya khususnya yang berkaitan dengan materi penerapan prinsip *customer due diligence* dan terhadap pencegahan tindak pidana pencucian uang.

## H. Metode Penelitian

### 1. Pendekatan dan Prosedur Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif. Metode Kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara

triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi.<sup>19</sup>

## 2. Desain Penelitian

Desain penelitian adalah pedoman atau prosedur serta teknik dalam perencanaan penelitian yang berguna sebagai pedoman untuk membangun strategi yang menghasilkan model atau *blue print* penelitian.<sup>20</sup> Adapun desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah desain penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi mengenai status suatu gejala yang ada, yaitu keadaan gejala menurut apa adanya pada saat penelitian dilakukan tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi.<sup>21</sup>

## 3. Partisipan dan Tempat Penelitian

Partisipan dalam penelitian adalah jumlah karyawan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bandar Lampung berjumlah 32 orang karyawan. Dalam penelitian ini yang akan menjadi narasumber dalam wawancara berjumlah 5 (empat) orang yakni dewan direksi, *customer service*, *teller*, dan pengawas internal. Lokasi penelitian yakni Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bandar Lampung yang terletak di Jl. P. Antasari No.148, Tj. Baru, Kedamaian, Kota Bandar Lampung,

<sup>19</sup> Sugiono, “*Metodologi Penelitian Bisnis*.” (Bandung : Alfabeta), 2010, h 9

<sup>20</sup> V. Wiratna Sujarweni, “*Metode Penelitian Bisnis & Ekonomi*.” (Yogyakarta : Pustaka Baru Press), 2015, h.71

<sup>21</sup> Fenti Hikmawati, “*Metode Penelitian*”, (Depok : Rajawali Pers), 2018, h.88

Lampung 35133.<sup>22</sup> Total aktiva atau aset yang dimiliki oleh BPRS Bandar Lampung pada juni 2019 adalah Rp 92,553,491 yang mengalami peningkatan dari bulan juni tahun 2018. Dengan jumlah Dana Pihak Ketiga (DPK) pada bulan juni 2019 yakni Rp 5,264,234.<sup>23</sup>

#### 4. Metode Pengumpulan data

Teknik pengumpulan data merupakan cara yang dilakukan peneliti untuk memperoleh data dan informasi dari responden sesuai dengan lingkup penelitian.

##### a. Observasi ( pengamatan )

Pengamatan adalah alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala – gejala yang diselidiki.<sup>24</sup> Observasi digunakan untuk mengetahui lokasi dan data – data yang akan di gunakan untuk penelitian oleh peneliti.

##### b. Wawancara

Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam topik tertentu.<sup>25</sup> Instrumen wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur. Wawancara terstruktur adalah wawancara dimana peneliti atau pengumpul data telah mengetahui dengan pasti informasi apa yang akan diperoleh. Dalam

<sup>22</sup> <http://banksyariahbandarlampung.co.id/identitas/>, diakses pada 29-7-2020, pukul 11.43 wib

<sup>23</sup> Laporan Keuangan OJK, diakses pada 29-7-2020, pukul 11.26 wib

<sup>24</sup> Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, “ *Metodologi Penelitian* “, (Jakarta : PT Bumi Aksara), 2015, h.70

<sup>25</sup> Fenti Hikmawati, “ *Metodologi Penelitian*”, (Depok : Rajawali Pers, 2018), h.83

melakukan wawancara, pengumpul data telah menyiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan – pertanyaan tertulis yang alternatif jawabannya pun telah dipersiapkan. Dengan wawancara terstruktur ini setiap responden diberi pertanyaan yang sama, dan pengumpul data mencatatnya.<sup>26</sup> Dalam penelitian ini wawancara akan dilakukan pada BPRS Bandar Lampung, dengan proses tanya jawab kepada beberapa karyawan BPRS yang telah ditetapkan sebagai responden dalam wawancara.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik atau metode pengumpulan data dengan cara mengambil data dari dokumen-dokumen yang ada. Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, dan sebagainya.<sup>27</sup>

5. Teknik pengolahan data

a. Editing

Merupakan proses mengoreksi kembali terhadap catatan, berkas – berkas, dan informasi yang dikumpulkan peneliti dan data yang sudah lengkap, benar, dan sudah atau relevan dengan masalah. Melalui editing diharapkan akan meningkatkan mutu kehandalan (reliabilitas) data yang data yang hendak dianalisa. Dalam hal ini penulis mengambil data yang akan dianalisis dari hasil observasi dan wawancara dengan pihak BPRS

<sup>26</sup> Sugiyono, “Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D”, (Bandung : Alfabeta, 2018) h, 138

<sup>27</sup> Suharsimi Arikunto, “*Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*” (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), h. 274.



Bandar Lampung, kemudian data yang dihasilkan dipilah kembali dan disesuaikan dengan kebutuhan penelitian. Dalam proses ini data harus dipastikan lengkap dan jelas sehingga tidak menyulitkan peneliti.

b. Organizing

Menyusun kembali data yang didapat dalam penelitian yang diperlukan dalam kerangka paparan yang sudah direncanakan dalam rumusan masalah. Dalam penelitian ini pengelompokan data dilakukan yaitu data tentang tabungan nasabah, aset dan DPK Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bandar Lampung serta prosedur dan mekanisme customer due diligence terhadap pencegahan tindak pidana pencucian uang.

c. Penemuan hasil

Menganalisis data yang diperoleh dari penelitian untuk memperoleh kesimpulan mengenai kebenaran fakta yang ditemukan, yang akhirnya merupakan jawaban dari rumusan masalah.<sup>28</sup> Tujuan akhir dari penelitian ini adalah analisis penerapan customer due diligence berupa identifikasi, verifikasi dan pemantauan guna pencegahan tindak pidana pencucian uang.

6. Teknik Analisis Data

Penelitian kualitatif analisis data berbeda dengan penelitian kuantitatif. Analisis data kualitatif dilakukan dengan menganalisis semua data yang tersedia dari berbagai sumber yaitu wawancara, pengamatan

---

<sup>28</sup> Sugiono, “*Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*”, (Bandung: Alfabeta, 2016), h.125

yang sudah dituliskan, dokumen, gambar dan sebagainya. Dalam menjelaskan analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah – milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan yang penting dan menemukan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan.<sup>29</sup>

a. Tahapan Penelitian

1) Tahap Pra Lapangan

Kegiatan yang harus dilakukan dalam penelitian kualitatif pada tahap pralapangan adalah menyusun rancangan penelitian yang memuat latar belakang masalah dan alasan pelaksanaan penelitian, studi pustaka, penentuan lapangan penelitian, penentuan jadwal penelitian pemilihan alat penelitian, rancangan pengumpulan data, rancangan analisa data, rancangan perlengkapan yang diperlukan di lapangan dan rancangan pengecekan kebenaran data.

2) Tahap Pekerjaan di lapangan

Penelitian naturalistik menuntut peneliti harus langsung mengumpulkan data dalam situasi sesungguhnya . oleh sebab itu peneliti harus turun sendiri ke lapangan. “ *No entry no research*”. Sebelumnya ia harus berusaha agar peneliti diperbolehkan memasuki lapangan itu, baik itu sekolah, pabrik, desa maupun tempat lain.

Tahap pekerjaan lapangan dibagi atas tiga bagian yaitu :

---

<sup>29</sup>Ibid, Analisis Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme PT BPR Insumo Sumberarto Kediri, h.103

- a) Memahami latar penelitian dan persiapan diri.
- b) Memasuki lapangan
- c) Berperan serta mengumpulkan data.<sup>30</sup>

### 3) Tahapan analisis di lapangan

Peneliti kualitatif menegnal adanya analisis data di lapangan walapun analisis data secara intensif barulah dilakukan sesudah kembali kerumah. Dengan bimbingan dan arahan masalah peneltian, peneliti dibawa kearah acuan tertentu yang mungkin cocok atau tidak cocok dengan dengan data yang dicatat.<sup>31</sup>

### b. Tahapan Analisis Data

#### 1) Reduksi Data

Suatu Analisis yang mempertegas, membuang hal yang tidak penting dan mengatur data sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir dapat dilakukan.<sup>32</sup>

Pada penelitian ini, peneliti mereduksi data setelah melakukan wawancara dan pengumpulan beberapa dokumen. Hasil data yang di dapat tidak semua dapat digunakan dalam menjawab rumusan masalah yang ada. Oleh karena itu, ada beberapa data yang tidak digunakan. Hasil wawancara akan di kelompokkan sesuai dengan kebutuhan.<sup>33</sup>

---

<sup>30</sup> Albi Anggito dan Johan Setiawan, “ *Metodologi Penelitian Kualitatif*”,(Sukabumi Jawa Barat : CV Jejak,2018) h 165-172

<sup>31</sup> Ibid, h 172

<sup>32</sup>Ibid, Peran Bank Tabungan Negara (BTN) Kantor Cabang Surakarta dalam Ikut serta Menanggulangi Tindak Pidana Pencucian Uang Melalui Perbankan, h.9

<sup>33</sup>Ibid, h.104

Dalam tahapan reduksi data, peneliti akan merangkum data yang telah dikumpulkan, memilih hal – hal pokok yang sesuai dengan pokok masalah serta sesuai dengan tujuan penelitian maupun fokus penelitian, dan mencari tema – tema data dan pola – pola yang ada pada data. Dalam kegiatan ini juga dilakukan penyusunan data dalam satuan – satuan atau kategori – kategori tertentu.<sup>34</sup>

## 2) Penyajian Data

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya. Dalam hal ini Miles dan Huberman (1984) menyatakan “the most frequent form of display data for qualitative research data in the past has been narrative text”. Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat narrative. Dengan mendisplaykan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja, selanjutnya apa yang telah dipahami tersebut “looking at display help us to understand what is happening and to do something further analysis or caution on that understanding”. Miles and Huberman (1984). Selanjutnya disarankan dalam melakukan display data, selain dengan teks naratif, juga dapat berupa, grafik, matrik, network (jejaring kerja) dan chart.<sup>35</sup>

---

<sup>34</sup>Sugiarto, “*Metodologi Penelitian Bisnis*”, (Yogyakarta : Andi (Anggota IKAPI), 2017, h.255

<sup>35</sup>Ibid, “*Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R & D*”, h 249

### 3) Menarik Kesimpulan

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti – bukti yang kuat mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih remang – remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori.<sup>36</sup>

#### c. Tahap Uji Keabsahan Data

Keabsahan data merupakan konsep penting diperbaharui dari konsep kesahihan (validitas) dan keandalan (reliabilitas).<sup>37</sup> Keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi uji *credibility* (validitas interval), *transferability* (validitas eksternal), *dependability* ( reliabilitas), dan *confirmability* (obyektivitas).

#### 1) Uji Kredibilitas

Uji kredibilitas dapat dilakukan dalam beberapa cara diantaranya :

##### (a) Perpanjangan pengamatan

Dengan perpanjangan pengamatan berarti peneliti kembali ke lapangan, melakukan pengamatan, wawancara lagi dengan

<sup>36</sup>Ibid, h 250

<sup>37</sup> Lexy J. Moleong, “ *Metodologi Penelitian Kualitatif*“, ( Bandung : PT Remaja Rosdakarya,2002), h. 171



sumber data yang pernah ditemui maupun yang baru. Dengan adanya pengamatan berarti hubungan peneliti dengan narasumber akan semakin terbentuk *rapport*, semakin akrab (tidak ada jarak lagi) semakin terbuka dan saling mempercayai sehingga tidak ada informasi yang disembunyikan lagi.

Pada proses perpanjangan pengamatan peneliti melakukan observasi serta wawancara secara berkesinambungan dengan beberapa narasumber di BPRS Bandar Lampung, yang dilakukan dalam waktu satu minggu, sehingga terjadi keakraban antara peneliti dengan narasumber. Tidak hanya satu minggu itu untuk memastikan kembali data informasi tentang CDD, peneliti menyusun kembali pertanyaan yang dianggap penting untuk ditanyakan kembali, sehingga didapatkan data informasi yang benar. Waktu yang dilakukan peneliti untuk melakukan penelitian ini lebih kurang selama satu bulan.

(b) Meningkatkan ketekunan

Meningkatkan ketekunan berarti melakukan pengamatan secara lebih cermat dan berkesinambungan. Dengan cara tersebut maka kepastian data dan urutan peristiwa akan dapat direkam secara pasti dan sistematis.<sup>38</sup>

Pada tahapan ini peneliti melakukan wawancara untuk memperoleh informasi dengan menggunakan media rekam audio,

---

<sup>38</sup> Sugiyono, “ *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R & D.*” (Bandung : CV Alfabeta, 2018), h. 270

yakni merekam percakapan dalam wawancara, dimana dalam melakukan hal ini telah mendapat persetujuan dari pihak narasumber, sehingga tidak ada data informasi yang terlewat karena dilakukan perekaman. Selain itu peneliti melakukan pencatatan terhadap hal – hal informasi yang penting. Setelah dilakukan perekaman, peneliti mencatat hasil rekaman dengan teliti. Hasil penelitian dicatat berdasarkan jawaban setiap narasumber. Peneliti melakukan sinkronisasi antara teori dan hasil yang di dapat di lapangan sehingga menemukan hasil yang tepat dan sesuai.

## 2) Pengujian Transferability

Seperti telah dkemukakan bahwa transferbility ini merupakan validitas eksternal dalam penelitian kualitatif. Validitas eksternal menunjukan derajat ketepatan atau dapat diterapkannya hasil penelitian ke populasi dimana sampel tersebut diambil. Nilai transfer berkenaan dengan pertanyaan, hingga mana hasil penelitian dapat ditetapkan atau digunakan dalam situasi lain. Oleh karena itu supaya orang lain dapat memahami hasil penelitian kualitatif sehingga ada kemungkinan untuk menerapkan hasil penelitian tersebut, maka peneliti dalam membuat laporannya harus memberikan uraian yang rinci, jelas, sistematis dan dapat dipercaya.<sup>39</sup>

---

<sup>39</sup> Ibid, “Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R & D”, h. 276-277

## **BAB II**

### **KAJIAN TEORI**

#### **A. Manajemen Resiko Bank Syariah**

##### **1. Pengertian Manajemen Resiko Bank Syariah**

Risiko dalam konteks perbankan merupakan suatu kejadian potensial, baik yang dapat diperkirakan (*anticipated*) maupun yang tidak dapat diperkirakan (*unanticipated*) yang berdampak negatif terhadap pendapatan dan permodalan bank. Risiko – risiko tersebut tidak dapat dihindari, tetapi dapat dikelola dan dikendalikan. Oleh karena itu sebagaimana lembaga perbankan pada umumnya, bank syariah memerlukan serangkaian prosedur dan metodologi yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur dan memantau dan mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan usaha atau biasa disebut dengan manajemen risiko.<sup>40</sup>

##### **2. Tujuan Manajemen Resiko Bank Syariah**

Tujuan manajemen risiko bank syariah yaitu diantaranya :

- a. Menyediakan informasi tentang risiko kepada pihak regulator.
- b. Memastikan bank tidak mengalami kerugian yang bersifat *unacceptable*.
- c. Meminimalisasi kerugian berbagai risiko yang bersifat *uncontrolled*.
- d. Mengukur eksposur dan pemusatan risiko.
- e. Mengalokasikan modal dan membatasi risiko.

---

<sup>40</sup> Adiwarman karim, “Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan”,(Jakarta PT Raja Grafindo Persada),2014, h. 255

### 3. Jenis – jenis Resiko Bank Syariah

#### a. Risiko Pembiayaan.

Risiko pembiayaan adalah risiko yang disebabkan oleh adanya kegagalan *counterparty* dalam memenuhi kewajibannya dalam bank syariah, risiko pembiayaan meliputi :

- 1) Risiko Terkait produk
- 2) Risiko Terkait Pembiayaan Koorporasi<sup>41</sup>

#### b. Risiko Pasar.

Yang dimaksud dengan risiko pasar adalah risiko kerugian yang terjadi pada portofolio yang dimiliki oleh bank akibat adanya pergerakan variabel pasar (*adverse movement*) berupa suku bunga dan nilai tukar.

Resiko pasar mencakup empat hal yaitu :

##### 1) Risiko Tingkat Suku Bunga

Risiko tingkat suku bunga adalah risiko yang timbul akibat dari fluktuasi tingkat bunga.

##### 2) Risiko Pertukaran Mata Uang

Risiko pertukaran mata uang adalah suatu konsekuensi sehubungan dengan pergerakan atau fluktuasi nilai tukar terhadap rugi laba bank.

##### 3) Risiko Harga

Risiko Harga adalah kemungkinan kerugian akibat perubahan harga instrumen keuangan.

---

<sup>41</sup> Ibid , 260-262

#### 4) Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas adalah resiko yang disebabkan oleh ketidakmampuan bank untuk memenuhi kewajibannya pada saat jatuh tempo.<sup>42</sup>

#### c. Risiko Oprasional.

Risiko oprasional adalah risiko antara lain disebabkan oleh ketidakcukupan atau tidak berfungsinya proses internal, *human eror*, kegagalan sistem atau adanya problem eksternal yang mempengaruhi oprasional bank. Risiko oprasional meliputi yaitu :

##### 1) Risiko Reputasi

Resiko reputasi adalah risiko yang antara lain disebabkan oleh adanya publikasi negatif yang terkait kegiatan bank atau adanya persepsi negatif terhadap bank.

##### 2) Risiko Kepatuhan.

Risiko kepatuhan adalah risiko yang disebabkan oleh tidak dipatuhinya ketentuan – ketentuan yang ada, baik ketentuan internal maupun eksternal.

##### 3) Risiko Strategik.

Risiko strategik adalah risiko yang antara lain disebabkan oleh adanya penetapan dan pelaksanaan strategi bank yang tidak tepat, pengambilan keputusan bisnis yang tidak tepat atau bank tidak

---

<sup>42</sup> Ibid, h. 272-274



mematuhi/ tidak melaksanakan perubahan perundang – undangan dan ketentuan lain yang berlaku.

4) Risiko Transaksi

Risiko Transaksi adalah risiko yang disebabkan oleh permasalahan dalam pelayanan atau produk – produk yang disediakan.

5) Risiko Hukum

Risiko hukum adalah risiko yang disebabkan oleh adanya kelemahan aspek yuridis, seperti adanya tuntutan hukum, ketiadaan peraturan perundang – undangan yang mendukung atau kelemahan perikatan (perjanjian) seperti tidak terpenuhinya syarat- syarat keabsahan suatu kontrak atau pengikatan agunan yang tidak sempurna.<sup>43</sup>

**B. Transaksi Keuangan Mencurigakan**

Undang Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU PPTPPU) yang menjelaskan bahwa Transaksi Keuangan Mencurigakan (TKM) meliputi :

1. Transaksi Keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik, atau kebiasaan pola Transaksi dari Pengguna Jasa yang bersangkutan;
2. Transaksi Keuangan oleh Pengguna Jasa yang patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan Transaksi yang bersangkutan yang wajib dilakukan oleh Pihak Pelapor sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini;

---

<sup>43</sup> Ibid, h. 275-278

3. Transaksi Keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan Harta Kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana; atau
4. Transaksi Keuangan yang diminta oleh PPATK untuk dilaporkan oleh Pihak Pelapor karena melibatkan Harta Kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana.

Selain itu, terdapat beberapa indikator umum yang termasuk dalam Transaksi Keuangan Mencurigakan, antara lain:

1. Tidak memiliki tujuan ekonomi dan bisnis yang jelas;
2. Menggunakan uang tunai dalam jumlah yang relatif besar dan/atau dilakukan secara berulang-ulang di luar kewajaran; atau
3. Aktivitas Transaksi nasabah di luar kebiasaan dan kewajaran.

Dengan demikian, pemeriksaan pada setiap transaksi keuangan mencurigakan menjadi sangat penting untuk dilakukan. Hal ini karena apabila terdapat oknum pelaku yang melakukan pencucian uang, biasanya pelaku tersebut tidak menghabiskan atau menggunakan properti yang diperoleh dari tindakan kriminalnya secara langsung, tetapi oknum tersebut akan terlebih dahulu untuk memasukan properti tersebut ke dalam sistem keuangan melalui fase penempatan, pelapisan atau integrasi. Upaya tersebut dilakukan dengan tujuan menyembunyikan atau menutupi asal-usul properti sehingga tampak menjadi legal. Selanjutnya, pelaku tindak pidana tersebut dapat menggunakan hasil tindak pidananya dengan aman.

Sehubungan dengan hal tersebut, identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan adalah salah satu kegiatan yang harus dilakukan oleh lembaga yang berwenang. Tindakan tersebut diperlukan untuk mendukung upaya pencegahan atau pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme. Namun, bukan berarti setiap transaksi keuangan mencurigakan merupakan hasil dari tindak pidana, melainkan transaksi legal yang berasal dari penjualan aset saat waktu tertentu. Maka, transaksi keuangan mencurigakan perlu untuk dilaporkan karena merupakan kewajiban langsung, dan kewajiban tidak langsung bagi sebuah lembaga penyedia jasa keuangan. Hal ini terkait dengan dapat diterima atau tidaknya penuntutan atas transaksi keuangan mencurigakan.<sup>44</sup>

### **C. Kebijakan Pelaksanaan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT).**

Upaya pencegahan Tindak Pidana Pencucian uang di Indonesia dimulai pada tanggal 17 april 2002 yaitu saat diberlakukannya undang-undang Nomor 15 tahun 2002 tentang tindak pidana pencucian uang. Tahapan pencegahan pencucian uang sudah dilakukan sebelum undang – undang tersebut lahir akan tetapi lingkupnya hanya terbatas pada bank.

#### **1. Program APU PPT**

- a. Program APU dan PPT merupakan program yang wajib diterapkan oleh BPR dan BPRS dalam melakukan hubungan usaha dengan pengguna jasa BPR dan BPRS (baik nasabah maupun Walk In Customer).

---

<sup>44</sup> [www.ppatk.go.id](http://www.ppatk.go.id) diakses pada 1 agustus 2020 pukul 22:43

Program tersebut antara lain mencakup hal – hal yang diwajibkan dalam rekomendasi Financial Action Task Force (FATF), yang dikenal dengan rekomendasi 40 + 9 FATF sebagai upaya untuk melindungi BPR dan BPRS agar tidak dijadikan sebagai sarana atau sasaran baik kejahatan secara langsung ataupun tidak langsung oleh pelaku kejahatan.

- b. Customer Due Diligence (CDD) merupakan salah satu instrumen program APU PPT. CCD tidak saja penting untuk mendukung upaya pemberantasan pencucian uang dan pendanaan terorisme, melainkan juga dalam rangka penerapan prinsip kehati – hatian perbankan (*prudential banking*). Pelaksanaan CDD membantu melindungi BPR dan BPRS dari berbagai resiko dalam kegiatan usaha BPR dan BPRS, seperti resiko oprasional, resiko hukum, dan resiko reputasi serta mencegah industri perbankan digunakan sebagai sarana atau sasaran tindak pidana, khusus nya pencucian uang dan pendanaan terorisme.
- c. Sebagai upaya meminimalisir penggunaan BPR dan BPRS sebagai media pencucian uang atau pendanaan terorisme, maka BPR dan BPRS wajib menerapkan program APU dan PPT. Program Apu dan PPT merupakan bagian dari penerapan prinsip kehati – hatian BPR dan BPRS dan paling kurang mencakup :
  - 1) Pengawas aktif Direksi dan Dewan Komisaris.
  - 2) Kebijakan dan Prosedur.
  - 3) Pengendalian Intern.
  - 4) Sumber Daya Manusia dan Pelatihan.

d. Dalam menerapkan program APU dan PPT, BPR dan BPRS wajib memiliki kebijakan dan prosedur tertulis yang paling kurang mencakup:

- 1) Pelaksanaan CDD terdiri dari :
- 2) Permintaan informasi dan dokumen
- 3) Verifikasi Dokumen dan
- 4) Pengkinian dan Pemantauan.
- 5) Penatausahaan dokumen.
- 6) Pemindahan dana.
- 7) Penutupan hubungan dan penolakan transaksi
- 8) Ketentuan mengenai Beneficial owner
- 9) Ketentuan mengenai area beresiko tinggi dan PEP
- 10) Pelaksanaan CDD yang lebih sederhana.
- 11) Pelaksanaan CDD oleh Pihak Ketiga.

e. Kebijakan dan prosedur diatas dituangkan dalam pedoman pelaksanaan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan harus mempertimbangkan faktor teknologi dan informasi yang berpotensi disalahgunakan oleh pelaku pencucian uang dan pendanaan terorisme, termasuk jika BPR atau BPRS mengeluarkan produk dan jasa baru. Agar tercapai pelaksanaan program APU dan PPT yang efektif, maka pedoman tersebut wajib dikomunikasikan kepada seluruh pegawai serta diterapkan secara konsisten dan berkesinambungan.<sup>45</sup>

---

<sup>45</sup> Lampiran Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/14/DKBU Tanggal 12 Mei 2011, h. 8-10.



## 2. Penerapan Program APU dan PPT

Program APU dan PPT pada BPR dan BPRS merupakan bagian dari pengelolaan risiko BPR dan BPRS secara keseluruhan. Penerapan program APU dan PPT yang paling kurang mencakup yaitu pengawasan aktif dewan direksi, kebijakan dan prosedur, pengendalian intern, dan sumber daya manusia.

### a. Pengawasan aktif dewan direksi

Pengawasan aktif dewan direksi mencakup hal-hal berikut yaitu memastikan BPR dan BPRS memiliki kebijakan dan prosedur APU dan PPT, mengusulkan kebijakan dan prosedur tertulis program APU dan PPT kepada dewan komisaris, memastikan penerapan program APU dan PPT dilaksanakan sesuai dengan kebijakan dan prosedur tertulis yang telah ditetapkan, membentuk unit kerja khusus dan/atau menunjuk pegawai yang bertanggungjawab terhadap program APU dan PPT di kantor pusat, memastikan bahwa unit kerja dan/atau pegawai melaksanakan kebijakan dan prosedur program APU dan PPT terpisah dari unit kerja/pegawai yang mengawasi penerapannya.

Pengawasan atas kepatuhan unit kerja/pegawai dalam menerapkan program APU dan PPT, memastikan bahwa kebijakan dan prosedur tertulis mengenai program APU dan PPT sejalan dengan perubahan dan pengembangan produk, jasa, dan teknologi BPR dan BPRS serta sesuai dengan pengembangan modus

pencucian uang atau pendanaan terorisme, memastikan bahwa seluruh pegawai, khususnya pegawai terkait dan pegawai baru telah mendapatkan pengetahuan yang berkaitan dengan program APU dan PPT.

b. Kebijakan dan Prosedur

1) Permintaan informasi dan dokumen

BPR dan BPRS wajib mengidentifikasi dan mengklarifikasi calon nasabah dan *beneficial owner*, kedalam kelompok perorangan, perusahaan atau lainnya.

2) Verifikasi Dokumen

BPR dan BPRS wajib melakukan verifikasi terhadap dokumen pendukung yang memuat informasi tentang calon nasabah yaitu perorangan, perusahaan, atau dalam bentuk bank, serta memastikan bahwa data tersebut adalah data yang benar dan terkini. BPR dan BPRS dapat melakukan wawancara dengan calon nasabah untuk meneliti dan meyakini kebenaran dokumen.

3) Pengkinian dan pemantauan.

BPR dan BPRS wajib melakukan pengkinian data terhadap informasi dan dokumen nasabah yang termasuk kedalam calon nasabah perorangan, perusahaan, atau bank.

4) Penatausahaan dokumen

BPR dan BPRS wajib menatausahakan dokumen yang terkait dengan data Nasabah atau WIC (walk In customer) dengan jangka waktu paling kurang 5 (lima) tahun sejak berakhirnya hubungan usaha atau transaksi dengan nasabah atau WIC atau ditmukan ketidaksesuaian transaksi dengan tujuan ekonomis dan/atau tujuan usaha.

#### 5) Pemindahan dana

Dalam melakukan kegiatan pemindahan dana untuk kepentingan nasabah atau WIC melalui rekening BPR/BPRS yang ada di Bank Umum atau Unit Usaha Syariah. BPR dan BPRS pengirim wajib memperoleh informasi dan melakukan identifikasi serta verifikasi terhadap nasabah pengirim atau WIC pengirim.

#### 6) Penutupan Hubungan Usaha atau Penolakan Transaksi

BPR dan BPRS wajib menolak melakukan hubungan usaha dengan calon nasabah dan/atau melaksanakan transaksi dengan WIC dalam hal calon nasabah tidak memenuhi kriteria identitas sebagai calon nasabah perorangan, perusahaan atau dalam bentuk bank. Diketahui memberikan identitas dan/atau informasi yang tidak benar.<sup>46</sup>

#### 7) Benefical Owner

---

<sup>46</sup> Peraturan Bank Indonesia Nomor 12/20/PBI/2010 Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, pasal 28.

BPR dan BPRS wajib memastikan apakah calon nasabah atau WIC mewakili Beneficial Owner untuk membuka hubungan usaha atau melakukan transaksi. Adapun dasar pertimbangan bank dalam menetapkan beneficial owner adalah perorangan yang memiliki saham sebesar 25% (dua puluh lima persen) atau lebih, perorangan yang memiliki saham kurang dari 25% (dua puluh lima persen) namun dapat dibuktikan yang bersangkutan melakukan pengendalian atau perorangan dalam perusahaan tersebut yang menjabat sebagai anggota direksi yang paling berperan dalam pengendalian perusahaan.<sup>47</sup>

8) *Politically Exposed Person* dan Area Beresiko Tinggi.

Penerapan program APU dan PPT juga ada ketentuan mengenai area beresiko tinggi dan (*politically exposed person*) PEP. Bank wajib memastikan adanya nasabah dan *Beneficial Owner* yang memenuhi kriteria beresiko tinggi atau PEP. Penetapan penggolongan beresiko tinggi dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan PPATK yang mengatur mengenai pedoman identifikasi produk, nasabah, usaha, dan negara beresiko tinggi bagi penyedia jasa keuangan dan pedoman mengenai identifikasi transaksi keuangan mencurigakan terkait pendanaan terorisme bagi penyedia jasa keuangan. Dalam menetapkan tingkat resiko nasabah, jasa, dan produk bank.

---

<sup>47</sup> Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/27/2012 Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Bank Umum, pasal 1.

Bank berpedoman pula pada referensi lainya yang diterbitkan oleh otoritas berwenang atau yang telah menjadi *internasional best practice*.

9) CCD lebih sederhana

Bank dapat menerapkan prosedur CCD yang lebih sederhana terhadap calon nasabah atau transaksi yang ada resiko terjadinya pencucian uang atau pendanaan terorisme diantaranya mengetahui tujuan pembukaan rekening calon nasabah perusahaan yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh pemerintah, calon nasabah berupa lembaga pemerintah atau instansi pemerintah, dokumen identitas perusahaan ditambah dengan spesimen tanda tangan dan kuasa kepada pihak – pihak yang ditunjuk mempunyai wewenang bertindak atas nama perusahaan dalam melakukan hubungan usaha dengan bank bagi calon nasabah perusahaan yang tergolong usaha mikro dan usaha kecil.

Bank wajib melaksanakan CCD terhadap nasabah sesuai dengan pendekatan berdasarkan resiko seperti terdapat peningkatan nilai transaksi yang signifikan, terdapat perubahan profil nasabah yang bersifat signifikan, dan informasi pada



profil nasabah yang tersedia dalam *Customer Identification File*, belum dilengkapi dengan dokumen seharusnya.<sup>48</sup>

#### 10) CCD oleh Pihak Ketiga

BPR dan BPRS dapat menggunakan hasil CDD yang telah dilakukan oleh pihak ketiga terhadap calon nasabahnya yang telah menjadi nasabah pada pihak ketiga tersebut. BPR dan BPRS wajib memastikan kecukupan identifikasi dan verifikasi atau hasil CCD yang telah dilakukan oleh pihak ketiga.

#### c. Pengendalian Intern

BPR dan BPRS wajib memiliki sistem pengendalian intern yang efektif untuk melaksanakan program APU dan PPT. Dalam memastikan efektifitasnya dilakukannya pemantauan terhadap efektivitas pelaksanaan program APU dan PPT oleh satuan kerja audit intern/atau pegawai yang ditunjuk untuk melakukan pengawasan.<sup>49</sup>

#### d. Sumber Daya Manusia dan Pelatihan

BPR dan BPRS wajib melakukan prosedur penyaringan (screening) dalam rangka penerimaan pegawai baru, untuk mencegah digunakannya BPR dan BPRS sebagai media pencucian uang atau

<sup>48</sup> Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/27/2012 Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Bank Umum, pasal 32.

<sup>49</sup> Peraturan Bank Indonesia Nomor 12/20/PBI/2010 Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, pasal 36

pendanaan terorisme yang melibatkan pihak intern BPR/BPRS.<sup>50</sup> Untuk mencegah ataupun mendeteksi terjadinya dugaan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh lembaga perbankan perlu diterapkan Know Your Employee (KYE) yang diantaranya adalah melalui prosedur pre employee screening, pengenalan dan pemantauan profil yang mencakup karakter perilaku dan gaya hidup karyawan.

Prosedur penyaringan dalam rangka penerimaan karyawan baru (*Pre Employee Screening*),serta pengenalan, dan pemantuan terhadap profil karyawan.<sup>51</sup> Selain itu bank harus memberikan pelatihan mengenai pnerapan program APU dan PPT kepada seluruh karyawan. Dalam menentukan peserta pelatihan, bank mengutamakan karyawan yang tugas sehari – harinya berhadapan langsung dengan nasabah (*Front Liner*), melakukan pengawasan pelaksanaan penerapan program APU dan PPT atau terkait dengan penyusunan pelaporan kepada PPATK.<sup>52</sup>

e. Pelaporan

Penerapan program APU dan PPT berdasarkan ketentuan kewajiban bank yaitu :

---

<sup>50</sup> Peraturan Bank Indonesia Nomor 12/20/PBI/2010 Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, pasal 37

<sup>51</sup> Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/27/2012 Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Bank Umum,pasal 44 ayat 2-4

<sup>52</sup> Ibid, PBI Nmomor 14/27/PBI/2012, Pasal 46

- 1) BPR dan BPRS wajib melaporkan pedoman pelaksanaan progra APU dan PPT tentang kebijakan dan prosedur APU dan PPT yang diterapkan oleh BPR/BPRS kepada Bank Indonesia sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.
  - 2) Setiap perubahan pedoman penerapan program APU dan PPT tentang kebijakan dan prosedur penerapan wajib melaporkan kepada Bank Indonesia sesuai dengan waktu yang ditentukan.
  - 3) BPR dan BPRS wajib melaporakan Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LKTM), laporan transaksi keuangan tunai, dan laporan lain kepada PPATK sebagaimana diatur dalam undang – undang yang mengatur Tindak Pidana Pencucian Uang.
  - 4) Kewajiban BPR dan BPRS untuk melaporkan Transaksi Keuangan Mencurigakan, juga berlaku untuk transaksi yang diduga terkait dengan kegiatan terorisme dan pendanaan terorisme.<sup>53</sup>
3. Penilaian atas Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah Terkait dengan Undang – Undang Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Tujuan penilaian atas penerapan prinsip mengenal nasabah dan kewajiban lain terkait undang – undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (PPTPPU).

---

<sup>53</sup> Peraturan Bank Indonesia Nomor 12/20/PBI/2010 Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, pasal 39-40.

- a. Penilaian atas penerapan prinsip mengenal nasabah dan kewajiban lain terkait dengan UU PPTPPU dimaksudkan untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai kecukupan dan efektivitas penerapan program APU dan PPT pada setiap bank umum.
- b. Penilaian oleh Bank Indonesia dilakukan secara kualitatif atas faktor manajemen resiko penerapan program APU dan PPT dan UU PPTPPU dengan pertimbangan dapat memberikan pertimbangan secara menyeluruh atas penerapan program APU dan PPT dan UU PPTPPU oleh bank umum yang bersangkutan.
- c. Penilaian dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan Bank Indonesia.
- d. Cakupan penilaian atas penerapan program APU dan PPT dan UU PPTPPU pada Bank umum mencakup 5 (lima) faktor yakni: pengawasan aktif oleh pengurus, kebijakan dan prosedur, penendalian intern, dan fungsi audit intern, sistem informasi dan manajemen, sumberdaya manusia dan pelatihan.
- e. Kreteria penilaian terhadap masing – masing faktor tersebut adalah nilai 1 (satu) untuk mencerminkan bahwa penerapan program APU dan PPT dan UU PPTPPU tergolong sangat baik, karena penerapannya dinilai sangat memadai dan sangat efektif untuk mengurangi resiko terkait dengan pencucian uang dan untuk memenuhi kewajiban sesuai ketentuan yang berlaku antara lain kewajiban pelaporan transaksi keuangan mencurigakan dan transaksi tunai kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan

(PPATK). Nilai 2 (dua), mencerminkan bahwa penerapan program APU dan PPT dan UU PPTPPU tergolong baik karena penerapannya dinilai telah memadai dan efektif untuk mengurangi risiko terkait dengan pencucian uang dan untuk memenuhi kewajiban terkait dengan pencucian uang dan untuk memenuhi kewajiban sesuai ketentuan yang berlaku antara lain kewajiban pelaporan transaksi keuangan mencurigakan dan transaksi tunai kepada PPATK. Nilai 3 (tiga), mencerminkan bahwa penerapan program APU dan PPT dan UU PPTPPU tergolong cukup baik, karena penerapannya dinilai cukup memadai dan cukup efektif untuk mengurangi risiko terkait dengan pencucian uang dan untuk memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan yang berlaku antara lain kewajiban pelaporan transaksi keuangan mencurigakan dan transaksi tunai kepada PPATK, walaupun masih terdapat kelemahan – kelemahan yang signifikan. Nilai 4 (empat), mencerminkan bahwa penerapan program APU dan PPT dan UU PPTPPU tergolong kurang baik, karena penerapannya dinilai kurang memadai dan kurang efektif untuk mengurangi risiko terkait dengan pencucian uang dan untuk memenuhi kewajiban sesuai ketentuan yang berlaku antara lain kewajiban pelaporan transaksi keuangan mencurigakan dan transaksi tunai kepada PPATK dan masih terdapat kelemahan – kelemahan yang signifikan yang harus diperbaiki. Nilai 5 (lima), mencerminkan bahwa penerapan program APU dan PPT dan UU

PPTPPU tergolong tidak baik, karena penerapannya dinilai tidak memadai dan tidak efektif untuk mengurangi resiko terkait pencucian uang dan untuk memenuhi kewajiban sesuai ketentuan yang berlaku antara lain kewajiban pelaporan transaksi mencurigakan dan transaksi tunai pada PPATK.<sup>54</sup>

4. Pengenaan Sanksi atas Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah terkait Undang – Undang tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Adapun sanksi tersebut sebagai berikut :

- a. BPR dan BPRS yang terlambat menyampaikan Pedoman Program APU dan PPT dan/atau perubahannya dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per hari keterlambatan per laporan dan paling banyak sebesar Rp 1000.000,00 ( satu juta rupiah)
- b. Selain terkena kewajiban membayar, BPR dan BPRS tetap wajib menyampaikan Pedoman Program APU dan PPT dan/atau perubahannya.<sup>55</sup>
- c. Teguran tertulis

<sup>54</sup> SE Nomor 13/14 DKBK 2011 Romawi II Perihal Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Dikutip dari kodifikasi Peraturan Bank Indonesia tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Bank. Pusat Riset dan Edukasi Bank Sentral (PRES) Bank Indonesia, 2013.

<sup>55</sup> Peraturan Bank Indonesia Nomor 12/20/PBI/2010 Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, Pasal 43 ayat 4.



- d. Penurunan tingkat kesehatan Bank, yang dimaksud tingkat kesehatan BPR/BPRS adalah tingkat kesehatan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai tata cara penilaian kesehatan BPR/BPRS.
- e. Pembekuan kegiatan usaha tertentu. Pembekuan kegiatan usaha tertentu adalah larangan terhadap kegiatan usaha yang menurut penilaian Bank Indonesia merupakan kegiatan usaha beresiko tinggi untuk digunakan sebagai sarana pencucian uang dan pendanaan terorisme dalam hal BPR/BPRS tidak menerapkan program APU dan PPT secara memadai.
- f. Pemberhentian pengurus bank.
- g. Pencantuman anggota pengurus, pegawai bank, dan/atau pemegang saham dalam daftar pihak – pihak yang mendapat predikat tidak lulus dalam penilaian kemampuan dan kepatutan atau dalam catatan administrasi Bank Indonesia sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia yang berlaku.<sup>56</sup>

#### **D. Customer Due Diligence**

Dalam praktek penerapan prinsip Customer Due Diligence, Reuter dan Truman dalam teorinya menjelaskan bahwa dalam hal pencegahan pencucian uang, upaya yang paling efektif adalah dengan menerapkan prinsip Customer Due Diligence (Prinsip Mengenal Nasabah) karena prinsip ini merupakan alat yang cukup kuat untuk mewaspadaai gejala –

---

<sup>56</sup> Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Pasal 58

gejala kejahatan perbankan, termasuk pencucian uang karena dengan menerapkan prinsip Customer Due Diligence maka mekanisme detail dari proses transaksi dapat dipantau dan bila terjadi berbagai indikasi yang mengarah kepada penyimpangan atau ketidakwajaran maka dapat ditindak lanjuti dengan cepat dan mudah.<sup>57</sup>

#### 1. Pengertian Customer Due Diligence

Menurut PBI nomor 11/28/PBI/2009 CDD (Customer Due Diligence) adalah kegiatan berupa identifikasi, verifikasi dan pemantauan yang dilakukan bank untuk memastikan bahwa transaksi tersebut sesuai dengan profil nasabah. CDD (Customer Due Diligence) adalah salah satu instrumen utama dalam program APU (Anti Pencucian Uang). Penerapan CDD (Customer Due Diligence) membantu melindungi bank dari berbagai resiko usaha bank.

Sedangkan EDD (Enhanced Due Diligence) yaitu CDD (Customer Due Diligence) dan kegiatan lain yang dilakukan oleh bank terkait untuk mendalami profil calon nasabah, nasabah atau BO (Benefit Owner) yang tergolong beresiko tinggi PEP (Politically Exposed Person) terhadap kemungkinan pencucian uang.<sup>58</sup>

Customer Due Diligence atau yang sering disebut dengan istilah CDD adalah kegiatan berupa identifikasi, verifikasi, dan pemantauan yang

---

<sup>57</sup> Levi dan Reuter, *"Money Laundering"* dalam *Crime and Justice in Scandanavia* (Chicago Journal Coverage : 1979-2011), vol 1-40,( Chicago : The University of Chicago Press,2011) h.297

<sup>58</sup> Khaira Ummati, *"Implementasi Kebijakan Anti Pencucian Uang dalam Pencairan Dana Deposito pada PT BNI Syariah Kantor Cabang Banda Aceh"*, Laporan Kerja Praktik, Program Diploma III. Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh,2017, h.45

dilakukan oleh bank untuk memastikan transaksi yang dilakukan sesuai dengan profil dan karakteristik, atau pola transaksi calon nasabah atau WIC yang merupakan penyempurnaan dari prinsip mengenal nasabah. CDD merupakan kegiatan yang diterapkan oleh bank untuk mengenal dan mengetahui identitas nasabah, memantau kegiatan transaksi calon nasabah atau WIC, termasuk melaporkan setiap transaksi mencurigakan kepada PPATK.<sup>59</sup>

## 2. Dasar Hukum Penerapan Customer Due Diligence

Bank Indonesia mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.3/10/PBI/2001 tentang prinsip mengenal nasabah (Know Your Customer Principles) pada tanggal 18 juni 2001. Penerapan ketentuan tersebut dilakukan berdasarkan pada 40 (empat puluh) rekomendasi FATF dan core principle no 15 Basel Commite of Banking Supervision. Saat ini PBI No. 3/10/PBI/2001 telah diubah dengan PBI No.3/23/PBI/2001 tanggal 13 desember 2001. Perubahan ini atas peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI/2001 tentang penerapan prinsip mengenal nasabah (Know Your Customer Principles) dan PBI No.5/21/PBI/2003 tanggal 17 oktober 2003 tentang perubahan kedua atas peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI/2001 tentang penerapan prinsip mengenal nasabah.<sup>60</sup>

Peraturan Bank Indonesia Nomor 12/20/PBI/2010 tentang penerapan program anti pencucian dan pencegahan pendanaan terorisme pada Bank

---

<sup>59</sup> Peraturan Bank Indonsia Nomor 3/10/PBI/2001 Tentang Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principals*).

<sup>60</sup> Arief Rezana Dislan, "Penerapan Prinsip Customer Due Diligence di PT Bank Muamalat Indonesia Cabang Medan Balai Kota, dalam Rangka Mencegah Tindak Pidana Pencucian Uang", Jurnal Hukum, Volume 7 Nomor 5, September 2019, h.115.

Perkreditan Rakyat (BPR) atau Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 tentang penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme di sektor jasa keuangan.

### 3. Pelaksanaan Customer Due Diligence

Istilah CDD dan EDD mulai digunakan pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/28/PBI/2009 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme. Dengan adanya PBI ini, maka bank umum wajib menerapkan program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (selanjutnya disebut program “APU” dan “PPT”). Penggunaan istilah CDD berlaku pada setiap kegiatan yang berupa identifikasi, verifikasi dan pemantauan yang dilakukan oleh bank untuk memastikan bahwa transaksi tersebut sesuai dengan profil nasabah (Pasal 1 angka 7). CDD dilakukan terhadap setiap nasabah yang memiliki resiko terjadinya pencucian uang akan tetapi untuk nasabah yang tergolong berisiko tinggi bank diwajibkan untuk melakukan Enhanced Due Diligence/EDD yaitu tindakan bank yang lebih mendalam yang dilakukan bank pada saat berhubungan dengan nasabah yang tergolong risiko tinggi termasuk Politically Exposed Person terhadap kemungkinan pencucian uang dan pembiayaan terorisme.<sup>61</sup>

---

<sup>61</sup> Bank Indonesia (d), Peraturan Bank Indonesia Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Bank Umum, PBI No.11/28/PBI/2009, pasal. 1.

Customer Due Diligence (CDD) merupakan kegiatan berupa identifikasi, verifikasi, dan pemantauan yang dilakukan bank untuk memastikan bahwa transaksi tersebut sesuai dengan profil calon nasabah, Walk in Customer (WIC), atau Nasabah. Customer Due Diligence dilakukan antara lain pada saat :

- a. Melakukan hubungan usaha dengan calon nasabah
- b. Melakukan hubungan usaha dengan WIC
- c. Terdapat informasi meragukan diberikan nasba, penerima kuasa, pemberi kuasa.
- d. Terdapat transaksi keuangan yang tidak wajar yang terkait dengan pencucian uang atau pendanaan terhadap terorisme.

Customer Due Diligence terhadap nasabah existing customer (nasabah yang sudah ada) dilakukan apabila terjadi hal sebagai berikut :

- a. Terdapat peningkatan nilai transaksi yang signifikan
- b. Terdapat perubahan profil nasabah yang bersifat signifikan
- c. Informasi nasabah yang disediakan di dalam CIF belum lengkap atau belum sesuai dengan informasi yang disyaratkan
- d. Adanya indikasi rekening yang menggunakan nama fiktif.

Prinsip mengenal nasabah adalah prinsip yang diterapkan oleh bank untuk mengetahui identitas nasabah, memantau kegiatan transaksi termasuk transaksi mencurigakan. Dalam menerapkan prinsip mengenal nasabah sebagaimana dimaksud dalam ayat 1(satu) bank wajib :

- a. Menetapkan kebijakan penerimaan nasabah

Kewajiban bank sebelum melakukan hubungan usaha dengan nasabah adalah mencari informasi sebagai berikut :

- 1) Informasi mengenai identitas calon nasabah.
- 2) Maksud dan tujuan hubungan usaha yang akan dilakukan calon nasabah dengan bank.
- 3) Informasi lain yang memungkinkan bank untuk dapat mengetahui profil calon nasabah dan identitas pihak lain, dalam hal calon nasabah bertindak untuk dan atas nama pihak lain.
- 4) Identitas calon nasabah sebagaimana dimaksud dalam ayat 1(satu) harus dapat dibuktikan dengan keberadaan dokumen-dokumen pendukung.<sup>62</sup>

b. Menetapkan kebijakan dan prosedur penerimaan nasabah

1) Identifikasi

Identifikasi nasabah di lembaga perbankan dibahas secara spesifik pada bagian prinsip mengenal nasabah (know your customer principles). Sedangkan untuk identifikasi transaksi tidak diatur secara detail. Orientasi dari identifikasi transaksi hanya menitik beratkan pada kewajiban bank untuk melaporkan transaksi yang mencurigakan. Meskipun dalam undang – undang tindak pidana pencucian uang tidak diatur secara tegas untuk melakukan identifikasi transaksi, dengan adanya kewajiban perbankan untuk melakukan pelaporan transaksi yang mencurigakan, pada

---

<sup>62</sup> PBI nomor 3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principles*). Pasal 2 ayat 1-4



hakikatnya telah ada kewajiban bagi penyedia jasa keuangan untuk melakukan identifikasi dan verifikasi transaksi nasabah, sebab tidak mungkin bisa melaporkan apabila tidak melalui identifikasi dan verifikasi.<sup>63</sup>

Bank wajib melakukan identifikasi calon nasabah/WIC tersebut sebagai berikut :

- a) Meminta informasi mengenai calon nasabah/WIC
- b) Meminta bukti identitas dan dokumen pendukung informasi tersebut.
- c) Penelitian atas kebenaran dokumen pendukung identitas.
- d) Permintaan kartu identitas lebih dari satu yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang apabila terdapat keraguan terhadap kartu identitas yang ada.
- e) Apabila diperlukan dapat dilakukan wawancara dengan calon nasabah untuk memperoleh keyakinan atas kebenaran informasi, bukti – bukti identitas dan dokumen pendukung.
- f) Menolak untuk membuka atau memelihara rekening anonim atau rekening yang menggunakan nama fiktif.
- g) Melakukan pertemuan langsung (*face to face*) dengan calon nasabah pada awal melakukan hubungan usaha dalam rangka meyakini kebenaran identitas.

---

<sup>63</sup> Try Widiyon, “*Aspek Hukum Operasional Transaksi Produk Perbankan di Indonesia*”, (Bogor : Ghalia Indonesia), 2006, h.89.

- h) Kewaspadaan terhadap transaksi atau hubungan usaha dengan calon nasabah yang berasal atau terkait dengan negara yang belum memadai dalam melaksanakan rekomendasi FATF dan penyelesaian proses verifikasi identitas calon nasabah.
- i) Beneficial Owner atau WIC dilakukan sebelum membina hubungan usaha dengan calon nasabah atau sebelum melakukan transaksi dengan WIC.<sup>64</sup>

Identifikasi penerimaan nasabah untuk pembukaan rekening baik perorangan atau lembaga minimal harus memuat hal sebagai berikut :

a) Rekening perorangan

Mengisi formulir standar yang ditetapkan oleh bank minimal berisi nama, alamat, tempat tanggal lahir, NIK, pekerjaan, alamat dan nomor telpon tempat bekerja, keterangan mengenai penghasilan, jika tidak bekerja diberi keterangan sumber penghasilan, sumber, tujuan penggunaan dana. Selain itu juga meminta informasi lain apabila diperlukan.

b) Rekening lembaga.

Bank dapat membuat suatu produk tabungan bagi perusahaan atau lembaga. Hal ini dijelaskan dalam buku operasional transaksi produk perbankan, berdasarkan surat Bank Indonesia No 3/30/DPNP/IDPnP/2001, secara tegas

---

<sup>64</sup> Ikatan Bankir Indonesia, “ *Mengusai Fungsi Kepatuhan Bank Modul Sertifikasi Compliance & Anti Money Laundering*”,(Jakarta Pusat : PT Gramedia Pustaka Utama),2015, h. 100-101

meyebutkan bahwa bank diperbolehkan untuk mengeluarkan produk baru rekening tabungan atas nama perusahaan atau lembaga sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam keputusan BI No 22/63/KEP/DIR/1989 tentang penyelenggaraan tabungan.<sup>65</sup>

Pihak yang dapat membuka rekening tabungan adalah sesuai dengan kebijakan dari masing – masing bank. Dalam ketentuan KYC tidak diatur mengenai klasifikasi perusahaan, termasuk perusahaan kecil atau besar. Oleh karena itu besar kecilnya perusahaan tersebut dapat diatur dalam kebijakan prinsip mengenal nasabah yang ditetapkan oleh direksi bank yang bersangkutan. Ketentuan perusahaan yang kecil minimal memenuhi ketentuan sebagai berikut.

- a) Mengisi standar minimal berisi status hukum dari usaha atau akta pendirian dan anggaran dasar.
- b) Surat izin usaha (SKU,SIUP,SITU,dll)
- c) Nama , spesimen tanda tangan dan kuasa kepada pihak yang ditunjuk.
- d) Keterangan mengenai sumber dan tujuan penggunaan dana.
- e) Bank dapat meminta tambahan dokumen lain dan dapat meminta informasi kepada calon nasabah mengenai hubungannya dengan bank lain.

---

<sup>65</sup> Try Widiyon, “*Aspek Hukum Oprasional Transaksi Produk Perbankan di Indonesia*”,(Bogor : Ghalia Indonesia),2006, h.173

Perusahaan yang tergolong besar, persyaratannya sama dengan perusahaan yang kecil, akan tetapi ada penambahan sebagai berikut:

- a) Persetujuan dari pejabat bank yang khususnya menangani nasabah besar, yang mempunyai resiko tinggi.
- b) Adanya laporan keuangan dan deskripsi bidang usaha yang mencakup profil pelanggan, alamat tempat kegiatan usaha dan nomor telpon.
- c) Struktur manajemen
- d) Dokumen identitas pengurus yang mewakili perusahaan
- e) Nama, spesimen tanda tangan dan kuasa atau kewenangan bertindak.
- f) Keterangan sumber serta penggunaan dana dan tujuan penggunaan dana.
- g) NPWP bagi nasabah yang diwajibkan menggunakan NPWP.<sup>66</sup>

Prinsip yang harus diperhatikan dalam pembukaan rekening untuk badan hukum dan non badan hukum adalah sebagai berikut :

- a) Kewenangan bertindak dari badan hukum dan non badan hukum yang bersangkutan. Hal ini tentunya akan berkaitan erat dengan ketentuan yang mengatur jenis badan tersebut, baik hukum maupun non badan hukum. Oleh karena itu, dalam pembuatan produk ini mutlak memperhatikan

---

<sup>66</sup> Ibid h 80

peraturan perundang – undangan yang menyangkut jenis badan tersebut.

- b) Siapa yang berwenang mewakili badan tersebut, hal ini berkaitan dengan, pihak yang menandatangani aplikasi pembukaan rekening.
- c) Status dari lembaga tersebut, apakah sudah berbadan hukum atau belum.
- d) Bukti dan data yang mendukung kewenangan bertindak.
- e) Apa yang akan dilakukan bank apabila lembaga yang belum berbadan hukum membuka rekening kemudian menjadi berbadan hukum.
- f) Dalam penarikan, transfer, pemindah bukuan dan lain – lain dilakukan oleh siapa.
- g) Pembukaan rekening dengan sarana kuasa.
- h) Perlakuan terhadap penarikan menggunakan fasilitas ATM
- i) Tata cara buku tabungan dibuat, contoh tanda tangan dan stempel.<sup>67</sup>

Identifikasi transaksi melalui pelaporan transaksi mencurigakan meliputi :

- a) Melaporkan transaksi mencurigakan, dan transaksi tunai dalam jumlah Rp 500.000.000,00 atau lebih

---

<sup>67</sup> Ibid h 185

- b) Transaksi yang dikecualikan adalah transaksi antar bank, transaksi dengan bank sentral, transaksi dengan pemerintah dan transaksi lain yang ditetapkan PPATK.
- c) Laporan transaksi keuangan tunai (LTKT) / Cash Transaction Reprt (CTR)
- d) Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM)/ Suspecious Transaction Report (STR)
- e) Laporan Transaksi Keuangan Transfer Dana dari ke Luar Negeri (LTKL)/ International Fund Transfer Instruction (IFTI).
- f) Penyedia jasa keuangan wajib menyimpan daftar transaksi yang dikecualikan.<sup>68</sup>

## 2) Risk Based Approach (RBA)

Risk Based Approach (RBA) merupakan salah satu metode untuk mendukung terlaksananya prosedur CDD yang efektif melalui pengelompokan nasabah berdasarkan tingkat resiko dari kemungkinan terjadinya pencucian uang atau pendanaan terorisme. Pemeringkatan resiko nasabah dari kemungkinan terjadinya pencucian uang dan pendanaan terorisme dibagi tiga klasifikasi resiko yaitu, resiko rendah, resiko menengah, dan resiko tinggi.

---

<sup>68</sup> Undang TPPU Pasal 13 ayat 1



Metode dasar pemeringkatan resiko dapat dilaksanakan dengan melakukan analisis terhadap faktor resiko terjadinya kegiatan pencucian uang antara lain :

- a) Identitas nasabah
- b) Profil nasabah
- c) Jumlah transaksi
- d) Kegiatan usaha nasabah
- e) Kewarganegaraan
- f) Lokasi usaha bagi nasabah perusahaan.
- g) Struktur kepemilikan nasabah perusahaan.
- h) Produk yang ditransaksikan oleh nasabah
- i) Negara tujuan/asal transaksi.
- j) Informasi lainnya, misalnya memiliki hubungan bisnis atau kedekatan dengan Politically Exposed Person (PEP).

Pengelompokan terhadap peringkat risiko WIC hanya dilakukan terhadap WIC yang melakukan transaksi sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau lebih atau yang nilainya setara baik yang dilakukan dalam satu kali ataupun beberapa kali transaksi dalam satu hari kerja. Dalam hal ini nasabah tergolong resiko tinggi atau nasabah menggunakan produk bank yang tergolong beresiko tinggi, maka bank diwajibkan untuk melakukan prosedur CCD yang lebih mendalam disebut dengan Enhanced Due Diligence (EDD), dan penerapan CDD yang lebih sederhana bagi

nasabah yang tergolong beresiko rendah sepanjang tidak terdapat dugaan transaksi pencucian uang atau pendanaan terorisme, dalam hal nasabah memiliki resiko tingkat menengah, maka terhadap yang bersangkutan diberlakukan persyaratan sebagaimana yang berlaku.<sup>69</sup>

### 3) Verifikasi terhadap dokumen

Proses verifikasi identitas wajib diselesaikan oleh pihak bank sebelum membina hubungan usaha calon nasabah Beneficial owner atau melakukan transaksi WIC. Bank wajib meneliti kebenaran dokumen yang diperoleh dari calon nasabah/Beneficial owner/WIC dan melakukan verifikasi terhadap dokumen tersebut untuk meyakini keabsahan dan kebenaran dokumen yang dimaksud.

Dalam rangka meyakini kebenaran identitas calon nasabah, verifikasi dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- a) Melakukan pertemuan langsung (face to face) dengan calon nasabah pada awal melakukan hubungan usaha.
- b) Melakukan wawancara dengan calon nasabah apabila diperlukan
- c) Mencocokkan kesesuaian profil calon nasabah dengan foto diri yang tercantum dalam kartu identitas.

---

<sup>69</sup> Ikatan Bankir Indonesia, “ *Mengusai Fungsi Kepatuhan Bank Modul Sertifikasi Compliance & Anti Money Laundering*”,(Jakarta Pusat : PT Gramedia Pustaka Utama),2015, h 104

d) Mencocokkan kesesuaian tanda tangan, cap jempol, atau sidik jari dengan dokumen identitas atau dokumen lainnya yang mencantumkan tanda tangan, cap jempol, atau sidik jari. Dokumen lainnya antara lain surat pernyataan nasabah, kartu keluarga atau kartu kredit.

e) Meminta kepada calon nasabah untuk memberikan lebih dari satu dokumen identitas yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang apabila timbul keraguan terhadap kartu identitas yang ada.

f) Menatausahakan dokumen kartu identitas setelah dilakukan pencocokan dengan dokumen asli yang sah.

g) Melakukan pengecekan silang untuk memastikan adanya konsistensi dari berbagai informasi yang disampaikan oleh calon nasabah.

h) Memastikan bahwa calon nasabah tidak memiliki rekam jejak negatif dengan melakukan verifikasi identitas calon nasabah menggunakan sumber independen lainnya, antara lain sebagai berikut :

(1) Daftar teroris dan/atau daftar terduga teroris dan organisasi teroris yang diterbitkan oleh kepolisian RI

(2) Daftar Hitam Nasional (DHN)

(3) Data lainnya yang dimiliki bank, seperti major credit card, identitas pemberi kerja dari calon nasabah, rekening telpon dan rekening listrik.

- i) Memastikan adanya kemungkinan hal-hal yang tidak wajar atau mencurigakan.

Dalam hal terdapat keraguan terhadap kebenaran dan keabsahan dokumen identitas calon nasabah, bank wajib meminta kepada calon nasabah untuk memberikan lebih dari satu dokumen identitas yang dikeluarkan pihak yang berwenang, untuk memastikan kebenaran identitas calon nasabah. Dalam kondisi tertentu, bank dapat melakukan hubungan usaha sebelum proses verifikasi identitas calon nasabah selesai.

Bank wajib menolak melakukan hubungan usaha dengan calon nasabah dan/atau melaksanakan transaksi dengan WIC apabila calon nasabah atau WIC.

- a) Tidak ada informasi yang memungkinkan bank untuk dapat mengetahui profil calon nasabah.
- b) Identitas calon nasabah tidak dapat dibuktikan dengan keberadaan dokumen – dokumen pendukung.
- c) Kebenaran dokumen pendukung identitas calon nasabah tidak dapat diyakini kebenarannya.

- d) Rekening anonim atau rekening yang menggunakan nama fiktif.
- e) Tidak terjadi pertemuan langsung (face to face) dengan calon nasabah pada awal melakukan hubungan usaha dalam rangka meyakini kebenaran identitas calon nasabah.
- f) Transaksi atau hubungan usaha dengan nasabah yang berasal atau terkait dengan negara yang belum memadai dalam melaksanakan rekomendasi FATF.
- g) Calon nasabah tidak dapat menyediakan dokumen pendukung identitas .
- h) Nasabah/calon nasabah diketahui atau patut diduga menggunakan dokumen palsu.
- i) Menyampaikan informasi yang diragukan kebenarannya.
- j) Berbentuk *Shell Bank* atau bank yang rekeningnya digunakan oleh *Shell Bank*
- k) Memiliki sumber dana transaksi yang diketahui atau patut diduga berasal dari hasil tindak pidana.

Adapun yang dimaksud dengan Shell Bank adalah bank yang tidak mempunyai kehadiran fisik (physical presence) di wilayah hukum bank tersebut didirikan dan memperoleh izin, dan tidak berafiliasi dengan kelompok usaha jasa keuangan yang menjadi subjek pengawasan terkonsolidasi yang efektif.

Bank tetap wajib menyelesaikan proses identifikasi dan verifikasi terhadap identitas calon nasabah atau WIC dan beneficial owner, dalam hal penolakan hubungan usaha dengan calon nasabah dan/atau penolakan transaksi dengan WIC karena nasabah/calon nasabah diketahui atau patut diduga menggunakan dokumen palsu atau menyampaikan informasi yang dirragukan kebenarannya.

Kewajiban bank untuk menolak, membatalkan dan/atau menutup hubungan usaha dengan nasabah sebagaimana di atas wajib mencantumkan dalam perjanjian pembukaan rekening dan diberitahukan kepada nasabah. Dalam hal dilakukan penutupan hubungan usaha tersebut, bank wajib memberitahukan secara tertulis kepada nasabah mengenai penutupan hubungan usaha tersebut.

Dalam hal setelah dilakukan pemberitahuan terhadap penutupan hubungan usaha tersebut, nasabah tidak mengambil sisa dana yang tersimpan di bank, maka penyelesaian terhadap sisa dana nasabah yang tersimpan di bank dilakukan sesuai peraturan perundang – undangan yang berlaku.<sup>70</sup>

#### 4) Pemantauan

Pemantauan transaksi secara umum adalah suatu proses atau tindakan yang dilakukan untuk memeriksa dan atau mengamati perkembangan, pergerakan aktivitas keuangan maupun profil

---

<sup>70</sup> Ibid h.105-107



nasabah WIC/BO yang dilakukan dalam waktu tertentu dan atau berkesinambungan. Customer Due Diligence dalam rangka penerapan program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT) bank wajib melakukan kegiatan pemantauan terhadap profil dan transaksi nasabah. Pemantauan terhadap profil dan transaksi nasabah harus dilakukan secara berkala dengan menggunakan pendekatan berbasis resiko.

a) Pemantauan Transaksi Nasabah

Pemantauan transaksi nasabah merupakan salah satu bagian dari proses program pencucian uang. Kegiatan pemantauan ini bertujuan untuk mendeteksi transaksi yang mempunyai unsur – unsur transaksi keuangan yang mencurigakan. Bank wajib melakukan pemantauan transaksi yang sekurang – kurangnya mencakup hal – hal berikut,

- (1) Dilakukan secara berkesinambungan untuk mengidentifikasi kesesuaian antara transaksi nasabah dengan profil nasabah.
- (2) Melakukan analisis terhadap seluruh transaksi yang tidak sesuai dengan profil nasabah. Contoh transaksi, aktivitas, dan perilaku yang tidak sesuai dengan profil nasabah.
- (3) Apabila diperlukan, bank dapat meminta informasi kepada nasabah tentang latar belakang dan tujuan transaksi yang tidak sesuai dengan profil nasabah.

(4) Seluruh kegiatan pemantauan didokumentasikan dengan tertib.

b) Pemantauan Data nasabah

(1) Pemantauan terkait CDD dan EDD

Kegiatan pemantauan merupakan bagian dari proses Customer Due Diligence (CDD) selain kegiatan identifikasi dan verifikasi yang dilakukan bank untuk memastikan bahwa transaksi tersebut sesuai dengan profil calon nasabah, WIC, nasabah atau BO. Bank secara berkala juga perlu memastikan kualitas profil nasabah apabila nasabah/WIC memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- (a) Tergolong beresiko tinggi atau PEP
- (b) Menggunakan produk perbankan yang beresiko tinggi untuk digunakan sebagai sarana pencucian uang atau pendanaan terorisme.
- (c) Melakukan transaksi dengan negara beresiko tinggi atau
- (d) Melakukan transaksi tidak sesuai dengan profil.

(2) Pemantauan terkait Pengkinian Data

Bank wajib mengkinikan data nasabah yang dimiliki agar pemantauan transaksi keuangan yang mencurigakan dapat berjalan secara efektif. Penetapan objek pengkinian data

data nasabah dilakukan melalui proses pemantauan khususnya mengenai peringkat resiko, karakteristik transaksi, dan kelengkapan data nasabah.

Pengkinian data dilakukan secara berkala berdasarkan tingkat resiko nasabah atau transaksi. Misalnya, untuk nasabah resiko tinggi, pengkinian data dilakukan setiap 1 tahun, untuk nasabah resiko rendah pengkinian data dilakukan setiap 3 tahun, dan untuk nasabah resiko menengah pengkinian data dilakukan setiap 2 tahun.

### (3) Pemantauan Terkait Negatif List

Bank wajib mengkinikan profil data nasabah secara reguler dengan melakukan pencocokan terhadap database daftar teroris yang diterima dari Bank Indonesia setiap enam bulan berdasarkan data yang dipublikasikan oleh PBB. Informasi mengenai daftar teroris, antara lain dapat diperoleh melalui :

- Website PBB :  
<http://www.un.org/sc/committees/1267/consolist.shtml>
- Sumber lainya yang lazim digunakan oleh perbankan dan merupakan data publik, antara lain The Office of Foreign Assets Controls List (OFAC List) dengan alamat situs internet

<http://www.treas.gov./offices/enforcement/ofac/index.shtml>

#### 5) Pengkinian

Pengkinian data nasabah merupakan tindak lanjut dari proses pemantauan bank. Pelaksanaan kegiatan pengkinian data nasabah merupakan hal yang sangat penting dalam penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT) mengingat data yang dihasilkan dari proses pengkinian data akan sangat berpengaruh terhadap kegiatan lainnya, khususnya berpengaruh terhadap identifikasi dan pemantauan transaksi keuangan yang mencurigakan. Ketika melakukan proses pengkinian data nasabah, bank wajib :

- (a) Melakukan pemantauan terhadap informasi dan dokumen nasabah.
- (b) Menyusun laporan rencana pengkinian data
- (c) Menyusun laporan realisasi pengkinian data.

#### a) Pemantauan informasi dan dokumen nasabah

Pengkinian terhadap dokumen identitas , antara lain dilakukan apabila terdapat transaksi keuangan yang memenuhi kriteria sebagai transaksi keuangan mencurigakan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang – undangan yang mengatur mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Kegiatan pengkinian data nasabah dilakukan dengan menggunakan

pendekatan berdasarkan resiko. Dalam hal sumber daya dimiliki bank terbatas, kegiatan pengkinian data dilakukan dengan skala prioritas misalnya :

- (1) Tingkat resiko nasabah.
- (2) Transaksi dengan jumlah yang signifikan dan/atau menyimpang dari profil transaksi atau profil nasabah (red flag)
- (3) Saldo yang nilainya signifikan atau
- (4) Informasi yang ada pada CIF belum lengkap.

Pengkinian data dilakukan secara berkala berdasarkan tingkat resiko nasabah/transaksi. Sebagai contoh untuk nasabah yang beresiko tinggi, pengkinian data dilakukan 6 bulan, untuk nasabah resiko rendah pengkinian data dilakukan setiap 2 tahun, dan untuk nasabah resiko menengah, pengkinian data dilakukan setiap 1 tahun sekali. Pelaksanaan pengkinian data nasabah dapat dilakukan antara lain pada saat :

- (1) Pembukaan rekening tambahan
- (2) Perpanjangn fasilitas pinjaman
- (3) Pemnggantian buku tabungan, ATM, atau dokumen produk perbankan lainnya
- (4) Kunjungan untuk keperluan safe deposit box
- (5) Pelunasan pinjaman

#### b) Laporan Rencana Pengkinian Data

Laporan kegiatan pengkinian data meliputi data kuantitatif dan data kualitatif. Yang dimaksud dengan “data kuantitatif”, antara lain berupa statistik jumlah nasabah yang datanya telah atau belum dikinikan. Yang dimaksud dengan “data kualitatif”, antara lain berupa kendala, upaya yang telah dilakukan bank, serta kemajuan (progress) dari upaya tersebut.

Laporan rencana opengkinian data merupakan komitmen bank dalam melaksanakan pengkinian data nasabah yang harus dilakukan dalam periode tertentu. Laporan disampaikan setiap tahun dalam laporan direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan bulan desember.

#### c) Laporan Realisasi Pengkinian Data

Laporan realisasi pengkinian data merupakan laporan yang memaparkan hasil dari pelaksanaan pengkinian data nasabah. Laporan disampaikan setiap tahun dalam pelaksanaan tugas direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan bulan desember.

### 4. Customer Due Diligence Lebih Sederhana

- a. BPR dan BPRS dapat menerapkan prosedur CDD yang lebih sederhana terhadap calon nasabah atau transaksi yang tingkat resiko terjadinya pencucian uang atau pendanaan terorisme tergolong rendah dan memenuhi kriteria sebagai berikut :

- 1) Tujuan pembukaan rekening untuk pembayaran gaji karyawan  
 Dalam hal ini rekening tersebut adalah rekening milik perusahaan



yang digunakan untuk pembayaran gaji karyawan perusahaan tersebut atau rekening nasabah perorangan yang tujuan pembukaan rekening adalah untuk menampung gaji yang diberikan perusahaan secara periodik.

2) Rekening berupa tabungan wajib terkait dengan pemberian kredit / pembiayaan dari BPR/BPRS yang sama.

3) Calon nasabah berupa perusahaan publik (perusahaan yang terdaftar pada bursa efek ) yang tunduk pada peraturan tentang kewajiban untuk mengungkapkan kinerjanya sehingga informasi tentang identitas perusahaan dan *Beneficial owner* dari nasabah perusahaan tersebut dapat diakses oleh masyarakat.

4) Nilai transaksi awal pembukaan rekening dibawah Rp 1000.000,00 (satu juta rupiah)

#### 5. Customer Due Diligence Oleh Pihak Ketiga

- a. BPR dan BPRS dapat menggunakan hasil CCD yang telah dilakukan oleh pihak ketiga terhadap calon nasabah yang telah menjadi nasabah pada pihak ketiga tersebut. Dalam hal ini BPR dan BPRS tetap wajib melakukan identifikasi dan verifikasi atas hasil CCD yang telah dilakukan oleh pihak ketiga.
- b. Pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah lembaga keuangan sesuai dengan ketentuan berlaku.
- c. Pihak ketiga berupa perusahaan non keuangan yang melakukan CCD atas dasar perjanjian kontrak (*outsourcing* atau agen), tidak termasuk

sebagai pihak ketiga yang dimaksudkan dalam ketentuan ini. Mengingat *outsourcing* atau agen merupakan perpanjangan tangan BPR/BPRS dimana proses CCD masih tetap mengacu kepada BPR/BPRS tersebut, bukan pada pihak ketiga nya.

d. Hasil CCD yang dapat digunakan oleh BPR dan BPRS adalah hasil CCD dari pihak ketiga yang memenuhi kriteria paling kurang sebagai berikut :

- 1) Memiliki prosedur CCD sesuai ketentuan yang berlaku
- 2) Memiliki kerjasama dengan BPR/BPRS dalam bentuk kesepakatan tertulis
- 3) Tunduk pada pengawasan dari otoritas berwenang (antara lain Bank Indonesia atau Bapepam-LK) sesuai ketentuan yang berlaku dan
- 4) Bersedia memenuhi permintaan informasi paling kurang berupa informasi mengenai ;
  - a) Nama lengkap sesuai dengan tercantum pada kartu identitas
  - b) Alamat, tempat, dan tanggal lahir
  - c) Nomor kartu identitas
  - d) Kewarganegaraan dari calon nasabah Serta salinan dokumen pendukung apabila dibutuhkan oleh BPR/BPRS dalam rangka pelaksanaan Program APU dan PPT. Kesediaan dimaksud dituangkan dalam kesepakatan tertulis sebagaimana dimaksud pada angka 2).

- e. BPR dan BPRS wajib memastikan kecukupan identifikasi dan verifikasi atas hasil CCD yang telah dilakukan oleh pihak ketiga. Tanggung jawab akhir atas hasil identifikasi dan verifikasi calon nasabah sepenuhnya menjadi tanggung jawab BPR dan BPRS.
- f. BPR dan BPRS bertanggung jawab untuk melaksanakan penatausahaan dokumen hasil CCD yang dilakukan oleh pihak ketiga serta data hasil identifikasi dan verifikasi yang dilakukan oleh BPR dan BPRS.<sup>71</sup>

#### 6. Customer Due Diligence dalam Ekonomi Islam

##### a. Pengertian Customer Due Diligence

kegiatan berupa identifikasi, verifikasi, dan pemantauan yang dilakukan oleh BPR dan BPRS untuk memastikan bahwa transaksi dilakukan sesuai dengan profil pengguna jasa bank.<sup>72</sup>

##### b. Tujuan ekonomi islam

Ekonomi islam dibangun atas dasar agama islam, karenanya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam berbagai aspek dari agama islam. Islam merupakan *way of life* dimana islam telah menyediakan perangkat aturan yang lengkap bagi kehidupan manusia termasuk dalam ekonomi islam. Islam bukan hanya berkaitan dengan spiritualitas atau ritualitas namun jauh lebih luas dari itu, islam merupakan serangkaian keyakinan, ketentuan dan peraturan serta tuntutan moral bagi setiap aspek kehidupan manusia sehingga akan mencapai kebahagiaan baik di dunia maupun diakhirat.

<sup>71</sup> Lampiran Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/14/DKBU Tanggal 12 Mei 2011, h.47-50

<sup>72</sup> Peraturan Bank Indonesia No 12/20/PBI/2010, Pasal 1 Angka 15

Dalam ajaran islam dikenal istilah *falah* yang berasal dari bahasa arab *flaha-yuflihu* artinya kesuksesan, kemuliaan, dan kemenangan. Untuk kehidupan di dunia, *falah* mencakup tiga pengertian yaitu kelangsungan hidup yang abadi, kesejahteraan yang abadi, dan kemuliaan yang abadi (beas dari segala kebodohan).<sup>73</sup>

c. Konsep Rasionalitas Islam

Setiap analisis ekonomi slalu didasarkan atas asumsi mengenai perilaku para pelaku ekonominya. Secara umum sering kali di asumsikan bahwa dalam pengambilan keputusan ekonomi, setiap pelaku selalu berfikir, bertindak dan bersikap secara rasional. Rasionalitas islam secara umum dibangun atas dasar aksioma – aksioma yang diderivasikan dari agama islam. Meskipun demikian beberapa aksioma merupakan kaidah yang berlaku umum dan universal sesuai dengan universalitas agama islam. Secara garis besar sebagai berikut :

1) Setiap pelaku ekonomi bertujuan untuk mendapatkan masalah

Untuk mewujudkan *falah* maka kegiatan ekonomi harus diarahkan untuk mencukupi lima jenis kebutuhan guna menghasilkan masalah. Karenanya, pada dasarnya setiap pelaku ekonomi akan berorientasi untuk mencapai masalah ini. Berkaitan dengan perilaku mencari masalah ini seseorang akan slalu :

---

<sup>73</sup> Risanda Alirastra Budiantoro,Dkk, “ *Sistem Ekonomi (Islam) dan Pelarangan Riba dalam Persepektif Historis*”, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, Vol 4 No 1,Maret 2018, h 5

- a) *Maslahah* yang lebih besar lebih disukai daripada yang lebih sedikit.

*Maslahah* yang lebih tinggi jumlah atau tingkatnya lebih disukai daripada *masalahah* yang lebih rendah jumlahnya atau tingkatnya atau *monotonicity* masalahah yang lebih besar akan memberikan kebahagiaan yang lebih tinggi, karenanya lebih disukai daripada *masalahah* yang lebih kecil.

- b) Masalahah diupayakan terus meningkat sepanjang waktu.

Konsep ini sering disebut dengan *quasi concavity* yaitu situasi masalahah yang menunjukkan pola non decreasing. Karena jika seseorang menderita sakit maka ia akan berusaha mengobati sakitnya tersebut, sebab sakit tidaklah menyenangkan dan dapat menurunkan masalahah hidupnya. Selanjutnya dia bersedia mengeluarkan sejumlah pengorbanan tertentu misalnya olahraga, vaksinasi dan lain – lain agar tidak jatuh sakit lagi dan lebih sehat dimasa depan agar masalahah hidupnya semakin meningkatkan atau setidaknya tetap.

- 2) Setiap pelaku ekonomi selalu berusaha untuk tidak melakukan kemubaziran (non wasting).

Dapat dipahami untuk mencapai suatu tujuan, maka diperlukan suatu pengorbanan. Namun jika pengorbanan tersebut lebih besar dari hasil yang diharapkan, maka dapat dipastikan bahwa telah terjadi pemubaziran atas suatu sumber daya. Perilaku

mencegah wasting ini diinginkan oleh setiap pelaku karena dengan terjadinya kemubaziran berarti telah terjadi pengurangan terhadap sumber daya yang dimiliki tanpa kompensasi berupa hasil yang sebanding.

- 3) Setiap pelaku ekonomi selalu berusaha untuk meminumkan resiko (risk aversion).

Risiko adalah sesuatu yang tidak menyenangkan dan oleh karenanya menyebabkan menurunkan masalah yang diterima. Hal ini merupakan konsekuensi dari aksioma monotonicity dan quasi concavity. Namun tidak semua resiko dapat dihindari atau diminimumkan. Hanya resiko yang dapat diantisipasi saja yang dapat dihindari atau diminimumkan. Ada juga resiko – resiko yang setiap orang bersedia untuk menanggungnya. Karena pertimbangan masalah yang lebih besar.

a) **Resiko yang bernilai (*Worthed Risk*)**

Resiko ini mengandung dua elemen yaitu resiko (*risk*) dan hasil (*return*). Kedua istilah ini muncul karena dalam hal – hal tertentu hasil selalu terkait dengan resiko, dimana keduanya dapat diantisipasi dan dikalkulasi seberapa besar peluang dan nilainya. Dengan membandingkan resiko dan hasil maka suatu resiko akan dapat ditentukan apakah resiko tersebut worthed atau tidak. Suatu resiko dapat dikatakan worthed jika dan hanya



jika resiko yang dihadapi nilainya lebih kecil daripada hasil yang diperoleh.

b) Risiko yang tak bernilai (*Unworthed Risk*)

Meskipun *worthed risk* telah menjadi fenomena di banyak kegiatan ekonomi saat ini, namun terdapat pula resiko – resiko yang *underworthed*, yaitu ketika nilai hasil yang diharapkan lebih kecil dari resiko yang ditanggung ataupun ketika resiko dan hasil tersebut tidak dapat diantisipasi dan dikalkulasi.

4) Setiap pelaku ekonomi dihadapkan pada situasi ketidakpastian

Ketidakpastian dapat menurunkan masalah yang diterima. Kemunculan resiko dalam banyak hal dapat diantisipasi melalui gejala yang ada. Gejala yang dimaksud disini adalah adanya ketidakpastian. Secara spesifik situasi ketidakpastian akan dapat menimbulkan resiko.

5) Setiap pelaku berusaha melengkapi informasi dalam upaya meminumkan resiko.

Dalam ketidakpastian setiap pelaku berusaha untuk mencari dan melengkapi informasi serta kemampuannya. Hal ini kemudian digunakan untuk mengkalkulasi apakah suatu resiko termasuk dalam kategori *worthed* atau *nworthed* sehingga dapat ditentukan keputusan apakah menghadapi resiko tersebut atau menghindarinya. Informasi dapat digali melalui fenomena kejadian

masa lalu ataupun petunjuk informasi yang diberikan pihak tertentu.<sup>74</sup>

d. Basis Kebijakan Ekonomi Islam

1) Penghapusan riba.

Pelarangan riba secara tegas ini dapat dijumpai dalam al-qur'an dan hadis. Arti riba secara bahasa adalah ziyadh yang artinya tambahan, pertumbuhan, kenaikan, membengkak dan bertambah, akan tetapi tidak semua pertumbuhan dan kenaikan dikategorikan sebagai riba. Secara fiqh, riba diartikan sebagai setiap tambahan dari harta pokok yang bukan merupakan kompensasi, hasil usaha ataupun hadiah. Namun pengertian riba secara teknis adalah pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil baik dalam utang – piutang maupun jual beli. Batil dalam hal ini adalah perbuatan ketidakadilan (zalim) atau diam menerima ketidakadilan. Pengambilan tambahan secara batil akan menimbulkan kezaliman diantara pelaku ekonomi. Dengan demikian, esensi dari pelarangan riba adalah penghapusan ketidakadilan dan penegakan keadilan dalam ekonomi.

2) Pelembagaan zakat

Sebagaimana diketahui zakat adalah sedekah yang diwajibkan atas harta seorang muslim yang telah memenuhi syarat bahkan ia merupakan rukun islam yang ketiga. Zakat pada dasarnya

---

<sup>74</sup> Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) Universitas Islam Indonesia Yogyakarta atas Kerjasama Dengan Bank Indonesia, " *Ekonomi Islam*", (PT RajaGrfindo : Jakarta,2013), h 27-30

merupakan sebuah sistem yang berfungsi menjamin distribusi pendapatan dan kekayaan masyarakat secara lebih baik. Ia merupakan sebuah sistem yang akan menjaga keseimbangan dan harmoni sosial diantara kelompok kaya (muzzaki) dan kelompok miskin (mustahik). Dalam praktiknya pada masa awal Islam, zakat dikelola oleh komite tetap dari pemerintahan dan menjadi bagian dari integral dari keuangan negara. Kerenanya kebijakan pengumpulan zakat maupun penyalurannya senantiasa terkait dengan kebijakan pembangunan negara secara keseluruhan. Zakat tidak diperlakukan sebagai pos ritual belaka, tetapi ia memiliki keterkaitan erat dengan kondisi riil masyarakat dalam satu negara. Dengan pelembagaan seperti ini, maka efektivitas maupun optimalitas pengelolaan zakat akan lebih terjamin.

### 3) Pelarangan gharar

Gharar adalah transaksi dengan hasil (*outcome*) tidak dapat diketahui atau diprediksi. Ketidakpastian ini terjadi karena adanya kekurangan informasi oleh para pihak. Pelarangan gharar membawa implikasi dihapuskannya berbagai bentuk kegiatan yang mendorong spekulasi dan perjudian dalam berbagai aktivitas ekonomi. Gharar akan menciptakan instabilitas dan kerapuhan dalam perekonomian baik dalam jangka pendek atau jangka panjang.

### 4) Pelarangan yang haram.

Dalam ekonomi islam segala sesuatu yang dilakukan harus halalan toyyiban yaitu benar secara hukum islam dan baik dari persepektif nilai dan moralitas islam. Kebailkan dari halalan toyyibah adalah haram, yaitu sesuatu yang jika dilakukan akan menimbulkan dosa. Meningglkan yang haram adalah mutlak kewajibanya sebaliknya melaksanakan yang halal adalah mutlak kewajibannya. Haram dalam hal ini dapat terkait zat dan prosesnya. Dalam hal zat islam melarang engonsumsi, memproduksi, mendistribusikan, dan seluruh mata rantainya terhadap beberapa komoditas dan aktivitas antara lain alkohol (khamr) dan sejenisnya yang mengurangi atau menghilangkan akal sehat, daging babi dan kebanyakan dari binatang buas, bangkai kecuali ikan, hewan yang disembelih bukan atas nama allah dan lain – lain. Dalam hal proses, islam mengharamkan setiap bentuk transaksi karena tiga hal. Pertama, perbuatan atau transaksi yang mengandung unsur atau potensi ketidakadilan (menzalimi atau dizalimi), seperti perjudian, pencurian, perampasan, riba, gharar. Kedua, transaksi yang melanggar prinsip salig ridha, sperti tadlis yaitu menyembunyian informasi yang relevan kepada pihak lawan transaksi. Ketiga, perbuatan yang merusak harkat manusia atau alam semesta, seperti prostitusi, minum yang memabukan dan sebagainya.<sup>75</sup>

---

<sup>75</sup> Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) Universitas Islam Indonesia Yogyakarta atas Kerjasama Dengan Bank Indonesia, " *Ekonomi Islam*", (PT RajaGrfindo : Jakarta,2013), h 70-72

## E. Tindak Pidana Pencucian Uang

### 1. Pengertian Tindak Pidana Pencucian Uang

Pencucian uang (Money laundering) dikenal sejak 1930 Amerika Serikat munculnya istilah tersebut erat kaitannya dengan usaha laundry. Pada saat itu kejahatan ini dilakukan oleh organisasi kejahatan mafia melalui pembelian perusahaan-perusahaan pencucian pakaian (laundry atau binatu) Perdagangan senjata api dan narkoba yang dilakukan oleh mafia disamarkan ditutupi kegiatannya dan perusahaan – perusahaan itu digunakan sebagai tempat untuk menyembunyikan kegiatan beserta hasilnya.<sup>76</sup>

Istilah *Money Laundry* berasal dari bahasa Inggris. *Money* artinya uang *Laundering* artinya pencucian. Jadi, money laundry secara harfiah artinya pencucian uang, atau pemutihan uang hasil kejahatan. International Criminal Police Organization (ICPO) memberikan definisi pencucian uang sebagai suatu tindakan yang berusaha mencoba menyembunyikan dan menyamarkan ciri – ciri dari suatu pendapatn ilegal sehingga seolah – olah berasal dari sumber yang sah atau legal.<sup>77</sup>

Menurut Sutan Remy Sjahdaeni (2003,6), money laundering yaitu rangkaian kegiatan yang merupakan proses yang dilakukan oleh seseorang atau organisasi terhadap uang haram, yaitu uang yang berasal dari kejahatan, dengan maksud untuk menyembunyikan atau meyamarkan asal-

---

<sup>76</sup> Tubagus Irman, “ *Money Laundering, Hukum Pembuktian Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Penetapan Tersangka*”, (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2017) h.6

<sup>77</sup> Florida Mathilda, “ *Tindak Pidana Pencucian Uang di Bidang Perbankan*”, Jurnal Sigma.Mu, Volume 5 No.2, September 2013, h. 63

usul uang tersebut dari pemerintah atau otoritas yang berwenang melakukan tindakan terhadap tindak pidana dengan cara terutama memasukkan uang tersebut ke dalam sistem keuangan sehingga uang tersebut selanjutnya dapat dikeluarkan dari system keuangan itu sebagai uang yang halal.<sup>78</sup>

## 2. Objek Tindak Pidana Pencucian Uang

Menurut Sarah N Welling, money laundering dimulai dengan adanya “uang haram” atau “ uang kotor” (*dirty money*) uang dapat menjadi kotor dengan dua cara yakni melalui cara pengelakan pajak (*tax evasion*) dan cara melanggar hukum. Yang dimaksud dengan” pengelakan pajak” ialah memperoleh uang secara legal tetapi jumlah yang dilaporkan kepada pemerintah untuk keperluan perhitungan pajak lebih sedikit daripada yang sebenarnya diperoleh. Sedangkan melalui cara – cara melanggar hukum teknik – teknik yang biasa dilakukan untuk hal itu antara lain, penjualan obat – obatan terlarang atau perdagangan narkoba secara gelap (*drug sales* atau *drug trafficking*), penjualan gelap (*illegal gambling*), penyuapan (*bribery*), terorisme (*terrorism*), pelacuran (*prostitution*), perdagangan senjata (*arms trafficking*), penyelundupan minuman keras, tembakau, dan pornografi (*smuggling of contraband alcohol, tobacco, and pornography*),

---

<sup>78</sup> Mas Ahmad Yani “Kejahatan Pencucian Uang (*Money Laundering*) Tinjauan Undang – Undang No 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang” E-Journal Widya Yustisia, Volume I Nomor 1, Mei 2013, h.21



penyelundupan imgran gelap ( *illegal imigration rackets* atau *people smuggling*) dan kejahatan kerah putih (*white colour crime*).<sup>79</sup>

### 3. Dasar Hukum Tindak pidana pencucian uang.

Undang – undang nomor 15 tahun 2002 tentang tindak pidana pencucian uang sebagaimana diubah dengan undang – undang nomor 25 tahun 2003 tentang perubahan atas undang – undang nomor 15 tahun 2002 tentang tindak pidana pencucian uang menyatakan bahwa yang dimaksud dengan pencucian uang adalah perbuatan menempatkan, mentransfer, membayarkan, mengibahkan, menyumbangkan, dan menitipkan, membawa keluar negeri, menukarkan atau perbuatan lainnya atas harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dengan maksud untuk menyembunyikan, atau menyamarkan, asal usul harta kekayaan sehingga seolah – olah menjadi harta kekayaan yang sah.

Undang – undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang terdapat dalam pasal 1 ayat 1 yang menyatakan bahwa pencucian uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan undang – undang ini. Adapun yang dimaksud dengan hasil tindak pidana pencucian uang adalah harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, penyuapan, narkoba, psikotropika, penyelundupan tenaga kerja, penyelundupan migran, di bidang perbankan, di bidang pasar

---

<sup>79</sup> Adrian Sutedi “ *Tindak Pidana Pencucian Uang*”,(Bandung : PT Citra Aditya Bakti),2008, h.16

modal, di bidang perasuransian, cukai, perdagangan orang, kepabean, perdagangan senjata gelap, terorisme, penculikan dan pencurian, penggelapan, penipuan, perjudian, prostitusi, dibidang perpajakan, dibidang kehutanan, di bidang kelautan, dibidang perikanan serta tindak pidana lain yang ancaman pidananya 4 (empat) tahun atau lebih.<sup>80</sup>

#### 4. Karakteristik tindak pidana pencucian uang.

Melihat batasan jumlah kekayaan yang dapat dikategorikan sebagai uang tindak pidana pencucian uang yaitu diatas 500 juta rupiah, yang bersumber dari pendapatan kegiatan sebagaimana telah dirumuskan di dalam UU tindak pidana pencucian uang sudah barang tentu kejahatan ini dilakukan oleh orang – orang yang mempunyai tingkat sosial yang tinggi, orang pintar da orang – orang yang sudah memiliki modal. Menurut Hazzel Coral (1992) sebagaimana dikutip oleh Hakristuti Hakrisnowo (2001), terdapat beberapa karakteristik yang umumnya melekat pada kejahatan *White Colar Crime* sebagai berikut :

- 1) Tidak kasat mata (*low visibility*)
- 2) Sangat kompleks (*Complexity*)
- 3) Ketidak jelasan pertanggungjawaban pidana (*Diffusion of Responsibility*)
- 4) Ketidak jelasan korban ( *Diffusion of victims*)
- 5) Peraturan hukum yang samar dan tudak jelas ( *ambiguos criminal law*)

---

<sup>80</sup>Iskandar Wibawa, " *Cyber Money Laundering* ", Jurnal Yudisia, Volume 8 Nomor 2, Desember 2017, h. 243

6) Sulit dideteksi dan dituntut (*weak detection and prosecution*).<sup>81</sup>

## 5. Metode Pencucian Uang

Ada tiga metode dasar, selain metode – metode lain yang digunakan oleh pelaku kejahatan finansial untuk memindahkan dana ilegal mereka dari satu sistem transaksi ke sistem lainnya. Metode – metode tersebut adalah

### a. Usaha legal

Usaha legal sering kali digunakan untuk memindahkan uang dari sistem tunai ke sistem transaksi usaha. Perolehan dari aktivitas ilegal dapat dicuci melalui suatu usaha yang legal dengan satu atau lebih cara-cara berikut:

- Kelebihan penulisan atas penerimaan legal
- Kelebihan penulisan atas pengeluaran legal
- Setoran tunai

### b. Transaksi jual beli

Disamping penggunaan usaha legal sebagai suatu cara memindahkan uang kedalam sistem transaksi usaha, transaksi jual beli yang dimanipulasi dapat melakukan hal yang sama, properti, real estate, atau jenis transaksi pribadi lainnya dapat dimanipulasi untuk menyembunyikan alur perolehan ilegal dan memberikan sumber nyata pendapatan legal bagi pelaku kejahatan keuangan.

### c. Negara – negara bebas pajak luar negeri.

---

<sup>81</sup>Fransiska Novita Eleanora “ *Tindak Pidana Pencucian Uang*”, Jurnal Hukum, Volume XXVI No.2, Agustus 2011, h. 646

Negara – negara diberbagai belahan dunia memiliki hukum dan sistem ekonomi yang berbeda, masih terdapat negara – negara yang dapat mencuci uang ilegal, beberapa negara tersebut dapat menampung rekening bank tersembunyi, membuat perusahaan fiktif dan pencucian uang, apabila uang telah masuk ke negara – negara tersebut tidak ada jalan atau cara untuk mendapatkan dokumentasi dan transaksi – transaksi ini setelah meninggalkan negara asalnya.<sup>82</sup>

#### 6. Tahapan pencucian Uang

Secara sederhana proses pencucian uang dapat dikelompokkan pada tiga kegiatan yakni placement, layering, dan integration.

- 1) Placement merupakan fase menempatkan uang yang dihasilkan dari suatu aktivitas kejahatan misalnya dengan pemecahan sejumlah besar uang tunai menjadi jumlah kecil yang tidak mencolok untuk ditempatkan dalam sistem keuangan baik dengan menggunakan rekening simpanan bank, atau dipergunakan untuk membeli sejumlah instrumen keuangan (cheques, money orders) yang akan ditagihkan dan selanjutnya di depositkan di rekening bank yang berada di lokasi lain. Placement dapat dilakukan pula dengan pergerakan fisik dari uang tunai, baik melalui penyelundupan uang tunai dari suatu negara ke negara lain, dan menggabungkan antara uang tunai yang berasal dari kejahatan dengan uang yang diperoleh dari hasil kegiatan yang sah. Proses

---

<sup>82</sup> Tubagus Irman, “ *Money Laundering, Hukum Pembuktian Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Penetapan Tersangka*”, (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2017) h.10 - 15

Placement merupakan titik paling lemah dari perbuatan pencucian uang.

- 2) Layering, diartikan sebagai memisahkan hasil tindak pidana dari sumbernya yaitu aktivitas kejahatan yang terkait melalui beberapa tahapan transaksi keuangan. Dalam hal ini terdapat proses pemindahan dana dari beberapa rekening, atau lokasi tertentu sebagai hasil *placement* ke tempat lainya melalui serangkaian transaksi yang kompleks yang didesain untuk menyamarkan/menyembunyikan sumber uang “haram” tersebut. Layering dapat pula dilakukan melalui pembukaan sebanyak mungkin ke rekening – rekening perusahaan – perusahaan fiktif dengan memanfaatkan ketentuan rahasia bank.
- 3) Integration, yaitu upaya untuk menetapkan suatu landasan sebagai suatu “*legitimate explanation*” bagi hasil kejahatan. Disini uang yang “dicuci” melalui placement maupun layering dialihkan kedalam kegiatan – kegiatan resmi sehingga tampak tidak berhubungan sama sekali dengan aktivitas kejahatan sebelumnya yang menjadi sumber dari uang yang di laundry. Pada tahap ini uang yang telah dicuci dimasukan kembali kedalam sirkulasi dengan bentuk yang sejalan dengan aturan hukum. Proses integration ini terjadi apabila proses layering terjadi dengan baik.<sup>83</sup>

---

<sup>83</sup>I Ketut Sukawati Lanang Putra Perbawa, “ *Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Sistem Perbankan di Indonesia*”, Jurnal Advokasi Vol 5 No 1 Maret 2015, h. 5 – 6 .

## 7. Dampak Tindak Pidana Pencucian Uang

Kegiatan pencucian uang yang dilakukan oleh organisasi – organisasi kejahatan dan oleh para penjahat individual sangat merugikan masyarakat karena itu banyak negara berupaya untuk memerangi kejahatan ini. Ini beberapa dampak kejahatan tindak pidana pencucian uang.

- a. Pencucian uang memungkinkan para penjual dan pengedar narkoba, para penyelundup, dan para penjahat lainnya untuk dapat memperluas kegiatan operasinya. Hal ini akan meningkatkan biaya perawatan serta pengobatan kesehatan bagi para korban dan pecandu narkoba.
- b. Kegiatan pencucian uang mempunyai kemampuan merongrong keuangan masyarakat (financial community) sebagai akibat sedemikian besarnya jumlah uang yang terlibat dalam kegiatan tersebut. Potensi untuk melakukan korupsi meningkat bersamaan dengan peredaran jumlah uang haram yang sangat besar.
- c. Pencucian uang mengurangi pendapatan pemerintah dari pajak dan secara tidak langsung merugikan para pembayar pajak yang jujur dan mengurangi kesempatan kerja yang sah.

Selain itu dampak makro ekonomi yang ditimbulkan oleh pencucian uang adalah distribusi pendapatan. Kegiatan kejahatan mengalihkan pendapatan dari para penyimpan dana terbesar (high saver) kepada penyimpan dana terendah (low saver), dari investasi yang sehat pada investasi yang beresiko dan berkualitas rendah.



Pencucian uang juga mempunyai dampak – dampak makro ekonomi yang tidak langsung (*indirect macroeconomic effects*). Transaksi ilegal dapat mencegah orang melakukan transaksi – transaksi yang melibatkan pihak – pihak luar negeri meskipun sepenuhnya legal telah menjadi kurang diminati akibat pencucian uang. Pada umumnya, kepercayaan pada pasar dan pada peranan efisiensi terhadap keuntungan telah terkikis oleh eluasnya perdagangan melalui orang dalam (*insider trading*), kecurangan (*fraud*), dan penggelapan (*embezzlement*).<sup>84</sup>

#### 8. Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang

##### a. Upaya Pencegahan Pada Lembaga Internasional

Pada tataran Internasional upaya dalam pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang dilakukan dengan membentuk satuan tugas yang disebut *The Financial Action Task Force (FATF) on money laundering* oleh kelompok tujuh negara (G-7) dalam G-7 di prancis pada bulan juli 1989. FATF memiliki anggota pada awal pembentukan sejumlah 29 negara/teritorial, serta 2 organisasi regional yaitu *the European Commision* dan *the Gulf Cooperation Council* yang mewakili pusat-pusat keuangan utama di Amerika, Eropa, dan Asia. Pada saat ini anggota FATF telah mencapai 37 anggota negara/teritorial dengan 2 organisasi regional dan

---

<sup>84</sup> Ibid , Adrian Sutedi, h. 130

Indonesia termasuk dalam pengamat FATF. Indonesia telah menjadi anggota sejak tahun 2000.

FATF di bertanggung jawab untuk memeriksa teknik dan tren pencucian uang, meninjau tindakan yang telah diambil di tingkat nasional atau internasional, dan menetapkan langkah-langkah yang masih perlu diambil untuk memerangi pencucian uang. Pada bulan April 1990, kurang dari satu tahun setelah pembentukannya, FATF mengeluarkan laporan yang berisi serangkaian Empat Puluh Rekomendasi , yang dimaksudkan untuk memberikan rencana tindakan komprehensif yang diperlukan untuk memerangi pencucian uang..

Pada Februari 2012, FATF menyelesaikan tinjauan menyeluruh atas standarnya dan menerbitkan Rekomendasi FATF yang direvisi. Revisi ini dimaksudkan untuk memperkuat perlindungan global dan lebih lanjut melindungi integritas sistem keuangan dengan menyediakan alat yang lebih kuat kepada pemerintah untuk mengambil tindakan terhadap kejahatan keuangan. Mereka telah diperluas untuk menghadapi ancaman baru seperti pembiayaan proliferasi senjata pemusnah massal, dan agar lebih jelas dalam hal transparansi dan lebih keras dalam korupsi. 9 Rekomendasi Khusus tentang pendanaan teroris telah sepenuhnya

terintegrasi dengan langkah-langkah melawan pencucian uang. Ini menghasilkan serangkaian standar yang lebih kuat dan lebih jelas.<sup>85</sup>

b. Upaya Pencegahan Lembaga Nasional.

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)

PPATK didirikan pada tanggal 17 april 2002 bersamaan disahkannya undang-undang No.15 Tahun 2002 tentang tindak pidana pencucian uang. Sebelum PPATK beroperasi secara penuh sejak 18 oktober 2003 tugas dan wewenang PPATK berkaitan dengan penerimaan dan analisis transaksi keuangan mencurigakan di sektor perbankan dilakukan oleh unit khusus investigasi Perbankan Bank Indonesia (UKIP-BI). Selanjutnya dengan penyerahan dokumen transaksi keuangan mencurigakan dan dokumen pendukung lainnya yang dilakukan pada tanggal 17 oktober 2003 maka tugas dan wewenang yang dimaksud beralih ke PPATK.

- 1) Tugas PPATK ( Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan)PPATK mempunyai tugas mencegah dan memberantas tindak pidana Pencucian Uang.
- 2) Fungsi PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan)
  - a) pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang
  - b) pengelolaan data dan informasi yang diperoleh PPATK

---

<sup>85</sup> <https://www.fatf-gafi.org/about/> diakses pada 14 juni 2020, pukul 11.59

- c) pengawasan terhadap kepatuhan Pihak Pelapor; dan
- d) analisis atau pemeriksaan laporan dan informasi Transaksi Keuangan yang berindikasi tindak pidana Pencucian Uang dan/atau tindak pidana lain.<sup>86</sup>

3) Wewenang PPATK ( Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan)

Pasal 41 UU No. 8 Tahun 2010 mengatur kewenangan PPATK sebagai berikut:

- a) Meminta dan mendapatkan data dan informasi dari instansi pemerintah dan/atau lembaga swasta yang memiliki kewenangan mengelola data dan informasi termasuk dari instansi pemerintah dan/atau lembaga swasta yang menerima laporan.
- b) Menetapkan pedoman identifikasi transaksi keuangan mencurigakan.
- c) Mengoordinasikan upaya pencegahan tindak pidana pencucian uang dengan instansi terkait.
- d) Memberikan rekomendasi kepada pemerintah mengenai upaya pencegahan tindak pidana pencucian uang.
- e) Mmewakili pemerinth Republik Indonesia dalam organisasi dan forum Internasional yang berkaitan dengan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.

---

<sup>86</sup> <http://www.ppatk.go.id/>, diakses pada 14 juni 2020, pukul 12.10

f) Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan anti pencucian uang.

g) Menyelenggarakan sosialisasi pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.

#### 9. Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Ekonomi Islam

Pencucian uang merupakan perbuatan yang sangat merugikan masyarakat, juga negara, karena dapat mempengaruhi dan merusak stabilitas perekonomian nasional khususnya keuangan negara. Hal ini sangat bertentangan dengan tujuan tasyri' yaitu mencegah mafsadah dan menciptakan maslahah. Pencucian uang menimbulkan kerusakan, kerugian, mudhrat, sekaligus menjauhkan dari kemaslahatan dari kehidupan manusia.

Hukum ekonomi islam yang berbasis pada al-qur'an dan al-hadis, sebagai suatu sistem kehidupan yang menyeluruh termasuk permasalahan moneter adalah solusi untuk mencegah dari money laundering. Ekonomi syariah memandang bahwa sebuah akibatnya apabila suatu tindakan sudah terkodifikasi dalam sebuah hukum atau undang – undang maka siapapun yang melanggarnya harus mendapatkan sanksi yang setimpal (hukuman). Pencucian uang merupakan tindakan yang melanggar hukum sehingga memerlukan tindak lanjut penguasa dan hakim. Seorang pemimpin harus bertugas menegakkan kebenaran dan keadilan menurut segala apa yang telah ditentukan oleh hukum-hukum syara', maka segala perbuatannya

dihubungkan dengan kemaslahatan bagi masyarakat yang di pimpinnya.

Dia berhak menjadikan Undang-undang untuk melindungi kemaslahatan.<sup>87</sup>

## **F. Sistem dan Prinsip – Prinsip Etika Bisnis Islam**

### **1. Sistem Etika Bisnis Islam**

#### **a. Pengertian Etika Bisnis Islam**

Dalam buku etika bisnis karangan Prof. Dr. H. Muhammad Djakfar menyebutkan bahwa etika bisnis islam adalah norma – norma etika yang berbasiskan Al – Qur'an dan Hadis yang harus dijadikan acuan oleh siapapun yang melakukan aktivitas bisnisnya. Etika bisnis islam adalah akhlak dalam menjalankan bisnis, sesuai dengan nilai – nilai islam, sehingga dalam melaksanakan bisnisnya tidak perlu ada kekhawatiran, sebab sudah diyakini, sebagai sesuatu yang baik dan benar.<sup>88</sup>

### **2. Prinsip – Prinsip Etika Bisnis Islam**

#### **a. Prinsip Kesatuan/Tauhid/Keesaan**

Tauhid, merupakan wacana teologis yang mendasar segala aktivitas manusia, yang termasuk kegiatan bisnis. Tauhid menyadarkan manusia sebagai makhluk ilahiya, sosok makhluk yang bertuhan. Dengan demikian, kegiatan bisnis manusia tidak terlepas dari pengawasan tuhan dalam rangka melaksanakan titah tuhan.

---

<sup>87</sup> Sumadi, Manajemen Bank Syariah Dalam Upaya Pencegahan Pencucian Uang dan Uang Haram, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Volume II, No. 3, November 2016.

<sup>88</sup> Erly Juliyani, Etika Bisnis Dalam Persepektif Islam, *Jurnal Ummu Qura*, Volume VII, No. 1, Maret 2016

Penerapan konsep keesan dalam etika bisnis yaitu :

- 1) Tidak akan berbuat diskriminatif terhadap pekerja, pemasok, pembeli atau siapapun pemegang saham perusahaan atas ras, warna kulit, jenis kelamin, ataupun agama.
- 2) Tidak dapat dipaksa untuk tidak berbuat etis, karena dia hanya takut kepada allah.
- 3) Tidak akan menimbun kekayaan dengan keserakahan, karena dia sadar harta di dunia bersifat sementara dan tidak mencari kekayaan dengan cara apapun.

b. Prinsip Keadilan/Kesinabungan

Ajaran islam berorientasi pada terciptanya karakter manusia yang memiliki sikap dan perilaku yang seimbang dan adil dalam konteks hubungan antara manusia dengan diri sendiri dan dengan orang lain ( masyarakat) dan dengan lingkungan. Keadilan dan keseimbangan berarti bahwa perilaku bisnis harus adil dan seimbang. Keseimbangan berarti tidak berlebihan (ekstrim) dalam mengejar keuntungan ekonomi.

c. Prinsip kebenaran, kebajikan dan kejujuran

Nilai kebenaran adalah merupakan nilai yang dianjurkan dalam ajaran islam. Dalam Al- Qur'an aksioma kebenaran yang mengandung kebajikan dan kejujuran dapat ditegaskan atas keharusan memenuhi perjanjian dalam melaksanakan bisnis. Dalam konteks etika bisnis yang harus dilakukan adalah dalam



hal sikap dan perilaku yang benar yang meliputi dari proses bisnis hingga hasil dari keuntungan bisnis yang diperoleh.

Kebajikan adalah sikap ihsan yang merupakan tindakan yang memberikan keuntungan bagi orang lain. Dalam pandangan islam sikap ini sangat dianjurkan, sedangkan kejujuran dipandang sebagai suatu nilai yang paling unggul dan harus dimiliki oleh seluruh masyarakat karena menjadi corak nilai manusia yang berakur.

d. Prinsip Kehendak Bebas/Kebebasan

Kebebasan berarti bahwa manusia sebagai individu dan kolektif punya kebebasan penuh untuk melakukan aktivitas bisnis. Manusia sebagai khalifah di muka bumi sampai batas – batas tertentu mempunyai kehendak bebas atau kebebasan untuk mengarahkan kehidupan kepada tujuan pencapaian kesucian diri.

Manusia dianugrahi kehendak bebas atau kebebasan (*free will*) untuk membimbing kehidupannya sebagai khalifah. Berdasarkan aksioma kehendak bebas ini etika bisnis islam mempunyai kehendak bebas dalam menjalani bisnis baik dari perjanjian yang dibuatnya apakah akan ditepati atau mengingkarinya. Seorang muslim yang percaya kepada tuhan nya maka ia akan menepati janjinya atau supah dalam melaksanakan bisnis nya.

e. Prinsip Tanggung Jawab.

Pertanggungjawaban berarti, bahwa manusia sebagai pelaku bisnis, mempunyai tanggung jawab moral kepada tuhan atas perilaku bisnis. Harta sebagai komoditi bisnis dalam islam, adalah amanah tuhan yang harus dipertanggungjawabkan dihadapan tuhan.

Penerapan tanggung jawab dalam etika bisnis, yaitu yang pertama, pengusaha berperilaku tidak etis tidak menyalahkan karena persoalan bisnis atau karena setiap orang juga berperilaku tidak etis, kedua, pelaku bisnis harus bertanggungjawab atas tindakanya, ketiga semua kewajiban harus dihargai, kecuali jika secara moral salah, menepati perjanjian bisnis yang sah.<sup>89</sup>

#### **G. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)**

##### **1. Pengertian Bank Perkreditan Rakyat syariah**

Bank syariah terdiri atas bank umum syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Sedangkan pada pasal 1 UU No 21 tahun 2008 tentang ketentuan bank umum disebutkan pengertian bank pembiayaan syariah (BPRS) adalah bank syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Bank pembiayaan Rakyat Syariah adalah bank syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran bentuk hukum BPRS perseroan terbatas. BPRS hanya boleh dimiliki oleh WNI dan/atau Badan Hukum Indonesia dengan pemerintah

---

<sup>89</sup> Khoirudin, "*Etika Bisnis Dalam Islam*", (Lampung : Pusat Penelitian dan Penerbitan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M), IAIN Raden Intan Lampung, 2015), h 50-62

daerah.<sup>90</sup> BPRS tidak dapat melaksanakan transaksi lalu lintas pembayaran atau transaksi falam lalu lintas giral fungsi BPRS pada umumnya hanya terbatas pada hanya pengimpunan dana dan penyaluran dana.<sup>91</sup>

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) merupakan bank dengan sistem oprasionalnya mengikuti prinsip – prinsip muamalah. Usaha pembiayaan rakyat termasuk BPRS meliputi penyediaan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil keuntungan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah (PP.No.72 Tahun 1992 tanggal 30 oktober 1992).<sup>92</sup> Menurut peraturan Pemerintah Tersebut bank (bank umum maupun BPR) yang melakukan usaha semata – mata dengan prinsip bagi hasil adalah prinsip bagi hasil berdasarkan syariah yang digunakan oleh bank berdasarkan prinsip bagi hasil dalam menetapkan imbalan :

- a. Yang akan diberikan kepada masyarakat sehubungan dengan dana masyarakat yang dipercayakan pada bank.
- b. Yang akan diterima sehubungan dengan penyediaan dana kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan baik untuk keperluan investasi maupun modal kerja.

---

<sup>90</sup> Andri Soemitra “*Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*”,(Bandung,Depok : Kencana,2017), h.59

<sup>91</sup> Ismail, “*Perbankan Syariah* “(Jakarta : Kencana,2011) h.54

<sup>92</sup> Suhrawardi K lubis dan Farid “*Hukum Ekonomi Islam*”,(Jakarta : Sinar Grafika, 2014) h.71

- c. Yang akan diterima sehubungan dengan kegiatan usaha lainnya yang lazim dilakukan oleh bank dengan prinsip bagi hasil.<sup>93</sup>

## 2. Dasar Hukum Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usaha atas dasar prinsip syariah, atau prinsip hukum islam yang diatur dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) seperti prinsip keadilan dan keseimbangan (*'adl wa tawazun*), kemaslahatan (*maslahah*), universalisme (*alamiyah*), serta tidak mengandung *gharar*, *maysir*, *riba*, *zalim*, dan objek yang haram. Selain itu UU Perbankan Syariah juga mengamanahkan untuk menjalankan fungsi sosial dengan menjalankan fungsi seperti lembaga baitul mal. Artinya, ia menerimana dana dari zakat, infak, sedekah, hibah atau dana sosial lainnya dan menyalurkan kepada pengelola wakaf (*na-zhir*) sesuai kehendak pemberi wakaf (*wakif*).<sup>94</sup>

Pengaturan mengenai kegiatan usaha Bank Umum dan BPR berlaku baik bagi bank konvensional maupun bank syariah ditetapkan dalam pasal 6, pasal 7, dan pasal 13 Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1998. Pasal – pasal tersebut memberikan daftar legitimasi kegiatan usaha yang boleh dilakukan oleh bank secara umum. Namun secara khusus untuk bank syariah kegiatan usaha yang dapat dilaksanakan adalah yang sesuai dengan prinsip syariah. Secara terperinci kegiatan

<sup>93</sup> Ibid, h 141

<sup>94</sup> Karsidi, *"Ibadah dan Bisnis di BPR Syariah"* (Jakarta : PT Elex Media Komputindo, 2018) h.108

usaha yang dapat dilakukan oleh BPRS seperti yang telah diatur dalam Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2008.<sup>95</sup>

Uraian kegiatan usaha Bank Syariah secara lebih perinci diatur dalam SK Direksi Bank Indonesia No 32/36/KEP/DIR Tentang BPR berdasarkan prinsip Syariah tanggal 12 Mei 1999 ini kemudian diganti dengan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No 6/17/PBI/2004 Tanggal 1 Juli 2004 Tentang Bank Perkreditan Rakyat berdasarkan prinsip syariah pada Pasal 34.<sup>96</sup>

### 3. Tujuan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

Setiap lembaga baik lembaga keuangan ataupun bukan lembaga keuangan memiliki tujuan oprasional, begitu juga dengan BPRS memiliki tujuan sebagai berikut :

- a. Meningkatkan kesejahteraan ekonomi umat islam, terutama kelompok masyarakat golongan ekonomi lemah yang pada umumnya berada di daerah pedesaan.
- b. Menambah lapangan pekerjaan terutama ditingkat kecamatan sehingga mengurangi arus urbanisasi.
- c. Membina ukhwah islamiyah melalui kegiatan ekonomi dalam rangka meningkatkan pendapatan perkapita menuju kualitas hidup yang memdai.<sup>97</sup>

---

<sup>95</sup> Gemala Dewi, “*Aspek – Aspek Hukum Dalam Perbankan & Perasransian Syariah Di Indonesia*” (Jakarta : Kencana, 2004) h 77

<sup>96</sup> Ibid 78

<sup>97</sup> Warkum Sumitro,” *Asas – asas Perbankan Islam dan Lembaga Terkait*”,(Jakarta : PT Raja Grafindo Persada,2004) h 129

#### 4. Fungsi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)

##### a. Penghimpun Dana Masyarakat

BPRS menghimpun dana masyarakat dengan menawarkan produk tabungan wadia'ah, tabungan mudharabah, dan deposito mudhrabah. Tabungan wadi'ah merupakan prinsip simpanan murni dari pihak yang menyimpan atau menitipkan kepada pihak yang menerima titipan untuk dimanfaatkan atau tidak dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan. Tabungan mudhrabah merupakan produk penghimpun dana oleh bank syariah. Bank syariah bertindak sebagai pengelola (mudharib) dan nasabah sebagai pemilik modal (shahibul mal). Nasabah menyerahkan pengelolaan dana tabungan mudharabah secara mutlak kepada bank syariah, tidak ada batasan baik dilihat dari jenis investasi, jangka waktu, maupun sektor usaha, dan tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah Islam. Hasil usaha yang dilaksanakan oleh pengelola dana atau pengguna dana akan dibagi dengan pemilik dana dengan pembagian sesuai kesepakatan bersama. Deposito mudharabah merupakan dana investasi yang ditempatkan oleh nasabah yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu, sesuai dengan akad perjanjian yang telah dilakukan antara bank dan nasabah investor. Karena hanya dapat ditarik sesuai jangka waktu tertentu, maka pada umumnya balas jasa yang berupa nisbah bagi hasil yang diberikan oleh bank untuk deposito lebih tinggi

dibanding tabungan mudhrabah. BPRS akan membayar bonus atau bagi hasil atas dana simpanan dan investasi nasabah. Besarnya bonus yang diberikan kepada nasabah sesuai dengan kemampuan bank dan bagi hasil yang diberikan sesuai dengan kesepakatan antara bank pembiayaan rakyat syariah (BPRS) dan nasabah.

b. Penyaluran dana kepada masyarakat.

BPRS menyalurkan dana nya dalam bentuk pembiayaan dan penempatan pada bank syariah lain atau BPRS lainnya. Dari aktivitas penyaluran dana ini BPRS memperoleh pendapatan dalam bentuk margin keuntungan yang berasal dari pembiayaan dengan akad jual beli atau pendapatan bagi hasil yang diperoleh dari pembiayaan kerjasama usaha.

c. BPRS Tidak Melaksanakan Lalu Lintas Pembayaran.

BPRS tidak melaksanakan transaksi lalu lintas pembayaran, oleh karena itu BPRS tidak diperbolehkan menawarkan produk giro wadiah. Giro wadiah adalah titipan dana pihak ketiga pada bank syariah yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, blyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan cara pemindah bukuan. Hal inilah yang membedakan antara bank umum dan unit usaha syariah, dengan BPRS.<sup>98</sup>

5. Akad pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

a. Al wadi'ah

---

<sup>98</sup> Ismail, "Perbankan Syariah", (Jakarta : Kencana,2011) h.54



Al wadiah merupakan prinsip simpanan murni dari pihak yang menyimpan atau menitipkan kepada pihak yang menerima titipan untuk dimanfaatkan atau tidak dimanfaatkan sesuai ketentuan. Titipan harus dijaga dan dipelihara oleh pihak yang menerima titipan. Dan titipan ini dapat diambil sewaktu – waktu pada saat dibutuhkan oleh pihak yang menitipkannya.<sup>99</sup>

b. Mudharabah

Merupakan akad perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan kerjasama usaha. Satu pihak akan menempatkan modal sebesar 100% yang disebut *shahibul mal* dan pihak lainnya sebagai pengelola usaha, disebut dengan *mudharib*. Bagi hasil dari usaha yang dikerjakasikan dihitung sesuai nisbah yang disepakati antara pihak – pihak yang bekerjasama.<sup>100</sup>

c. Murabahah

Murabahah merupakan akad jual beli atas barang tertentu, dimana penjual menyebutkan harga pembelian barang kepada pembeli kemudian menjual kepada pihak pembeli dengan mensyaratkan keuntungan yang diharapkan sesuai dengan jumlah tertentu. Dalam akad murabahah, penjual menjual barangnya dengan meminta kelebihan atas harga beli dengan harga jual. Perbedaan antara harga beli dan harga jual barang disebut dengan margin keuntungan.<sup>101</sup>

d. Musyarakah

---

<sup>99</sup> Ibid, h 59

<sup>100</sup> Ibid, h 83

<sup>101</sup> Ibid, h 138

Musyarakah merupakan akad kerjasama usaha antara dua pihak atau lebih dalam menjalankan usaha, dimana masing – masing pihak menyertakan modalnya sesuai dengan kontribusi dana atau sesuai kesepakatan bersama. Musyarakah disebut juga dengan syirkah, yaitu aktivitas berserikat dalam melaksanakan usaha bersama antara pihak – pihak yang berserikat.<sup>102</sup>

e. Ijarah

Ijarah merupakan kontrak antara bank syariah sebagai pihak yang menyewakan barang dan nasabah sebagai penyewa, dengan menentukan biaya sewa yang disepakati oleh pihak bank dan pihak penyewa. Barang – barang yang dapat disewakan pada umumnya yaitu aset tetap seperti gedung, mesin, peralatan, kendaraan, dan aset tetap lainnya. Dalam transaksi perbankan, bank membeli aset tetap dari supplier kemudian disewakan dengan nasabahnya dengan biaya sewa yang tetap hingga jangka waktu tertentu. Bank dapat membeli aset tetap dari supplier yang ditunjuk oleh bank syariah, kemudian setelah aset siap dioperasikan, maka aset tetap tersebut disewakan kepada pihak nasabah.<sup>103</sup>

## H. Tinjauan Pustaka

1. Hasil Penelitian yang dilakukan oleh Satrio Sakti Nugroho dengan judul *“Implementasi Customer Due Diligence dan Enhanced Due Diligence Dalam Mencegah Tindak Pidana Pencucian Uang.”* Metode

---

<sup>102</sup> Ibid, h 176

<sup>103</sup> Ibid, h. 159

yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode Kualitatif dengan pendekatan Yuridis Sosiologis. Hasil dari Penelitian ini yaitu pengawasan internal bank yang bersangkutan terkait dengan pelaksanaan Customer Due Diligence dan Enhanced Due Diligence adalah pada saat melakukan hubungan usaha awal dengan calon nasabah baik kategori PEP (*High Risk*) maupun tidak, dengan pendekan *mapping* wilayah, melakukan pelaporan transaksi mencurigakan oleh nasabah dalam bentuk STR ( *Suspicious Transasction Report* ) melakukan pelaporan nasabah/WIC dengan transaksi lebih dari atau sama dengan Rp 500.000.000,00 ( lima ratus juta rupiah ) dalam bentuk CTR ( Cash Transasction Report ) adanya pembagian kewenangan pegawai *front linier* pada saat calon nasabah ataupun WIC melakukan hubungan usaha dengan bank.<sup>104</sup>

2. Hasil Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Ali Imron dengan judul “ *Implementasi Undang – Undang No.8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang di Sektor Perbankan* .“Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis normatif. Hasil dari penelitian ini adalah Undang – Undang No 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian uang sebagai suatu tindak pidana tersebut. Untuk mencegah pemanfaatan sektor perbankan sebagai sarana pencucian uang, maka bank perlu

---

<sup>104</sup>Satrio Sakti Nugroho, “ *Implementasi Customer Due Diligence dan Enhanced Due Diligence dalam Mencegah Tindak Pidana Pencucian Uang*”, Jurnal Hukum Universitas Negeri Semarang, Vol 3 No 1, 2014, h.53.

menerapkan prinsip mengenali nasabah (*customer due diligence* dan *enhanced due diligence*) dan kewajiban pelaporan kepada PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan). Prinsip mengenali penggunaan jasa keuangan sekurang – kurang nya memuat identifikasi pengguna jasa, verifikasi pengguna jasa dan pemantauan transaksi pengguna jasa. Selain itu bank sebagai penyedia jasa keuangan (PJK) wajib menyampaikan laporan kepada PPATK yang meliputi transaksi keuangan mencurigakan, transaksi keuangan tunai paling sedikit Rp.500.000.000,00 atau dengan mata uang asing yang nilainya setara, yang dilakukan baik dalam satu kali transaksi maupun dalam beberapa kali transaksi dalam satu hari kerja dan/atau transaksi keuangan transfer dana dari ke luar negeri.<sup>105</sup>

3. Eko Prakoso Johannes dengan judul “ *Customer Due Diligence dalam Mencegah Tindak Pidana Pencucian Uang Melalui Lembaga Perbankan.*” Hasil penelitian tersebut adalah Setiap bank wajib melakukan prosedur Customer Due Diligence (CDD) saat melakukan hubungan usaha dengan calon nasabah pada transaksi keuangan dengan mata uang rupiah dan/atau mata uang asing yang nilainya paling sedikit Rp.100.000.000,00 (seratus juta Rupiah), atau terdapat indikasi transaksi keuangan mencurigakan, atau apabila bank meragukan kebenaran informasi yang diberikan oleh calon nasabah, nasabah, penerima kuasa, dan/atau pemilik manfaat dari rekening bank

---

<sup>105</sup> Muhammad Ali Imron “ *Implementasi Undang – Undang No.8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang di Sektor Perbankan .*“, Tesis Universitas Indonesia, (2012), h 121

(Beneficial Owner). Bank wajib melaporkan transaksi perbankan yang mencurigakan kepada PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan). PPATK berperan untuk mengumpulkan, menganalisis, serta mengevaluasi informasi yang diperoleh dari Bank. Apabila dalam analisisnya PPATK menemukan transaksi keuangan yang berindikasi tindak pidana pencucian uang, maka PPATK melaporkan kepada penyidik untuk ditindaklanjuti.<sup>106</sup>

4. M.Rudi Setiawan, dengan judul *“Implementasi Prinsip Mengenal Nasabah Sebagai Upaya Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang”*, metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah legal research, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan – penerapan kaidah atau norma dalam hukum positif yang berlaku. Hasil dari penelitian ini adalah bank dalam penerapan prinsip mengenal nasabah harus benar – benar memiliki analisis yang baik terhadap calon nasabahnya. Prosedur identifikasi nasabah dalam rangka penerapan prinsip mengenal nasabah tidak hanya prosedur pada umumnya dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI/2001 tetapi juga harus menggali lebih dalam tentang nasabah itu sendiri, karena tidak dapat dipungkiri kecanggihan teknologi saat ini juga menunjang terjadinya tindak pidana pencucian uang dengan berbagai macam bentuk, sehingga bank juga harus bisa menganalisis lebih detail tentang karakteristik nasabah demi mengantisipasi atau mencegah

---

<sup>106</sup> Eko Prakoso Johannes, *“Customer Due Diligence Dalam Mencegah Tindak Pidana Pencucian Uang”*, Law Review, Volume XIX No 1, 2019, h.93-94

munculnya celah yang bisa mengakibatkan terjadinya tindak pidana pencucian uang.<sup>107</sup>

5. Rycar G.B Pakhpahan, dengan judul *“Implementasi Prinsip Customer Due Diligence Pada Oprasional Bank Umum Sebagai Upaya Pencegahan Kejahatan Pencucian Uang di Indonesia”*. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Hasil dari penelitian ini adalah implementasi prinsip customer due diligence pada oprasionl bank umum sebagai upaya pencegahan kejahatan pencucian uang di Indonesia sebenarnya terkait erat dengan 3 (tiga) hal, yaitu : sejauh mana pemerintah, perbankan dn seluruh *stalkholder* bereran serta dan memiliki niat baik untuk merumuskan dan menetapkan berbagai regulasi yang efektif (jelas dan tidak tumpang tindih), mengimplementasikan berbagai atauran perundang – undangan terkait CDD dalam suatu pola pengawasan terpadu, tegas, terarah dan kontinu, serta penetapan, pemberian/pengenaan prinsip *punish and reward* (sanksi dan penghargaan) terhadap PJK yang mengimplementasikan prinsip CDD dengan tepat (baik).<sup>108</sup>
6. Rizka Fitrianita,dengan judul *“Customer Due Diligence (CDD) dalam Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT) di BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Ponorogo”*. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini

---

<sup>107</sup> M.Rudi Setiawan, *“Implementasi Prinsip Mengenal Nasabah Sebagai Upaya Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang”*, Journal Diversi, Volume 3 Nomor 2, 2017, h.154

<sup>108</sup> Rykcar G.B Pakpahan *“ Implementasi Prinsip Customer Due Diligence Pada Oprasional Bank Umum Sebagai Upaya Pencegahan Tindak Kejahatan Pencucian Uang di Indonesia”*, ( Tesis Program Ilmu Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta, 2012) h.124

adalah dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah prosedur customer due diligence pada tahapan identifikasi transaksi yang dilakukan adalah melakukan identifikasi terhadap kartu identitas nasabah (KTP).selanjutnya pada tahapan verifikasi dalam proses CCD adalah dilakukannya tahapan memastikan keaslian data nasabah dengan mencocokkan tanda tangan dan foto diri yang diterbitkan oleh pihak brwenang dalam jangka waktu yang masih berlaku sekaligus melakukan wawancara untuk eneliti dan meyakini keabsahan dan kebenaran dokumen serta verifikasi yang dilakukan oleh supervisor. Sedangkan untuk penerapan pemantauan transaksi pada proses CDD dilakukan melalui laporan transaksi keuangan mencurigakan apabila ditemukan transkasi mencurigakan atau menyimpang dari data profil yang ada, transaksi dengan nominal Rp 500.000.000,00 atau lebih dan transaksi yang dilakukan oleh WIC.<sup>109</sup>

---

<sup>109</sup> Rizka Fitrianita,dengan judul “*Customer Due Diligence (CDD) dalam Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT) di BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Ponorogo*”,(Tesis, Program Magister Ekonomi Syariah, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo,Ponorogo,2019), h.125



## DAFTAR PUSTAKA

Arikunto, Suharsimi “*Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*” , Jakarta:

Rineka Cipta, 2013

Bank Indonesia (d), Peraturan Bank Indonesia Tentang Penerapan Program Anti

Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Bank Umum,

PBI No.11/28/PBI/2009, ps. 1.

Bank Indonesia (d), Peraturan Bank Indonesia Tentang Penerapan Program Anti

Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Bank Umum,

PBI No.11/28/PBI/2009

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bandar Lampung, tersedia pada

<http://banksyariahbandarlampung.co.id/identitas/>, (29-Juli-2020)

Budiantoro, Risanda Alirastra, Dkk, “ *Sistem Ekonomi (Islam) dan Pelarangan*

*Riba dalam Persepektif Historis*”, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, Vol 4 No

1,Maret 2018.

Bungin,Burhan “ *Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi, kebijakan Publik,*

*dan Ilmu sosial Lainnya* “, Jakarta : Prenada Media Group, 2007.

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: PT

Gramedia Pustaka Utama,2011.

Dewi, Gemala,“*Aspek – Aspek Hukum Dalam Perbankan & Perasransian Syariah*

*Di Indonesia* “Jakarta : Kencana, 2004.

Djumhana,Muhammad,“*Hukum Perbankan di Indonesia*”, Citra Aditya Bakti

,Bandung : Citra Aditya Bakti,2012

Dislan, Arief Rezana,” *Penerapan Prinsip Customer Due Diligence di PT Bank Muamalat Indonesia Cabang Medan Balai Kota, dalam Rangka Mencegah Tindak Pidana Pencucian Uang*”, Jurnal Hukum, Volume 7 Nomor 5 September 2019.

Eleanora, Fransiska Novita, “ *Tindak Pidana Pencucian Uang*”, Jurnal Hukum, Volume XXVI No.2, Agustus 2011.

Erly Juliyani, Etika Bisnis Dalam Persepektif Islam, *Jurnal Ummu Qura*, Volume VII, No. 1, Maret 2016.

Financial Action Task For (FATF), tersedia pada <https://www.fatf-gafi.org/about/> (1-Agustus-2020)

Handoyo, Budi, “ *Mekanisme Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundry) di Perbankan*”, Jurnal At – Tasyiri, Volume IX, No 2, Juli – Desember 2017.

I Ketut Sukawati Lanang Putra Perbawa, “ *Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Sistem Perbankan di Indonesia*”, Jurnal Advokasi Vol 5 No 1 Maret 2015.

Ikatan Bankir Indonesia, “ *Mengusai Fungsi Kepatuhan Bank Modul Sertifikasi Compliance & Anti Money Laundering*”, Jakarta Pusat : PT Gramedia Pustaka Utama),2015

Irman,Tubagus “ *Money Laundering,Hukum Pembuktian Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Penetapan Tersangka*”, Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama,2017.

Ismail, “*Perbankan Syariah* “Jakarta : Kencana,2011.

- Johannes, Eko Prakoso, “*Customer Due Diligence Dalam Mencegah Tindak Pidana Pencucian Uang*”, Law Review, Volume XIX No 1, 2019
- Karsidi, “*Ibadah dan Bisnis di BPR Syariah*” Jakarta : PT Elex Media Komputindo, 2018.
- Karim, Adiwarmanto, “*Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*”, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2014.
- K Lubis, Suhrawadi dan Farid “*Hukum Ekonomi Islam*”, (Jakarta : Sinar Grafika, 2014.
- Khoirudin, “*Etika Bisnis Dalam Islam*”, Lampung : Pusat Penelitian dan Penerbitan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M), IAIN Raden Intan Lampung, 2015.
- Kurniawan, Iwan, ” *Perkembangan Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering) dan Dampaknya terhadap Sektor Ekonomi dan Bisnis*”, Jurnal Ilmu Hukum, Vol 3 No 1.
- Lampiran Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/14/DKBU Tanggal 12 Mei 2011
- Levi dan Reuter, “*Money Laundering*” dalam Crime and Justice in Scandanivia (Chicago Journal Coverage : 1979-2011), vol 1-40,( Chicago : The University of Chicago Press, 2011).
- Mathilda, Florida, “ *Tindak Pidana Pencucian Uang di Bidang Perbankan*”, Jurnal Sigma.Mu, Volume 5 No.2, September 2013.
- Mas Ahmad Yani “*Kejahatan Pencucian Uang (Money Laundering) Tinjauan Undang – Undang No 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan*

*Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*” E-Journal Widya  
Yustisia, Volume I Nomor 1, Mei 2013

Moleong, J. Lexy “ *Metodologi Penelitian Kualitatif* “, Bandung : PT Remaja  
Rosdakarya, 2002.

Muhammad, “*Manajemen Dana Bank Syariah*” , Jakarta: PT RajaGrafindo  
Persada, 2014.

Muhammad Ali Imron “ *Implementasi Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2010  
Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang  
di Sektor Perbankan* “, Tesis Program Sarjana Starata Dua (S2), Universitas  
Indonesia, 2012, h 65

Muhammad Ali Imron “ *Implementasi Undang – Undang No.8 Tahun 2010  
Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang  
di Sektor Perbankan* . “, Tesis Universitas Indonesia, 2012.

Mujahidin, Akhmad, “ *Hukum perbankan Syariah*”, Jakarta : PT Raja  
Grafindo, 2014.

Narbuko, Cholid dan Abu Achmadi, “ *Metodologi Penelitian* “, Jakarta : PT Bumi  
Aksara, 2015.

Nugroho, Satrio Sakti, “ *Implementasi Customer Due Diligence dan Enhanced  
Due Diligence dalam Mencegah Tindak Pidana Pencucian Uang*”, Jurnal  
Hukum Universitas Negeri Semarang, Vol 3 No 1, 2014.

Otoritas Jasa Keuangan, Prinsip Mengenal Nasabah Anti Pencucian Uang, tersedia  
pada [www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id). (29-Juli-2020)

Otoritas Jasa Keuangan , Statistik Perbankan , Laporan Keuangan,tersedia pada [www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id),(29-Juli-2020)

Pardede, Marulak “ *Hukum Pidana Bank*” , Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 1995.

Pasal 1 angka 8 Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/27/PBI/2012 tentang Penerapan Program Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Bank Umum.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/27/PBI/2012, Tentang Penerapan Program Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Bank Umum, Pasal 1 Angka 8.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/27/2012 Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Bank Umum.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 12/20/PBI/2010 Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

Peraturan Bank Indonsia Nomor 3/10/PBI/2001 Tentang Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principals*).

Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) Universitas Islam Indonesia Yogyakarta atas kerjasama dengan Bank Indonesia, “*Ekonomi Islam*”, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada,2013.

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), tersedia pada [www.ppatk.go.id](http://www.ppatk.go.id),(1-Agustus-2020).

Rivai, Veithzal et. al. *“Commercial Bank Management Manajemen Perbankan Dari Teori ke Praktik.”* , Jakarta : Rajawali Pers, 2013.

Rizka Fitrianita, dengan judul *“Customer Due Diligence (CDD) dalam Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT) di BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Ponorogo”*, (Tesis, Program Magister Ekonomi Syariah, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, Ponorogo, 2019.

Rodoni, Ahmad dan Abdul Hamid, *“Lembaga Keuangan Syariah”* , Jakarta : Zikrul Haki, 2008.

Rykar G.B Pakpahan *“ Implementasi Prinsip Customer Due Diligence Pada Operasional Bank Umum Sebagai Upaya Pencegahan Tindak Kejahatan Pencucian Uang di Indonesia”*, ( Tesis Program Ilmu Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta, 2012

Sahara, Suryadi M *“ Prinsip Kehati – hatian dan Prinsip Mengenal Nasabah Sebagai Upaya Perbankan Mencegah Tindak Pidana Pencucian Uang”*, Jurnal Lex Et Societatis Vol. 4 No 10, 2018.

SE Nomor 13/14 DKBK 2011 Romawi II Perihal Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Dikutip dari kodifikasi Peraturan Bank Indonesia tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Bank. Pusat Riset dan Edukasi Bank Sentral (PRES) Bank Indonesia, 2013.

Sjahdeini, Sutan Rey, “ *Perbankan Syariah Produk – Produk dan Aspek – Aspek Hukumnya* “, Jakarta : Prenamedia Group, 2015.

Soemitra, Andri, “ *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*”, (Bandung, Depok : Kencana, 2017.

Sugiono, “ *Metodologi Penelitian Bisnis.*” , Bandung : Alfabeta, 2010.

Sugiarto, “ *Metodologi Penelitian Bisnis*”, Yogyakarta : Andi (Anggota IKAPI), 2017.

Sugiyono, “ *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R & D.*” (Bandung : CV Alfabeta, 2018.

Sujarweni, Wiratna V, “ *Metode Penelitian Bisnis & Ekonomi.*” Yogyakarta : Pustaka Baru Press, 2015.

Sulistia, Teguh dan Aria Zurnetti, “ *Hukum Perdana Horizon Pasca Reformasi* “, Jakarta : Raja Grafindo Persada , 2012.

Sumadi “ *Telaah Kasus Pencucian Uang dalam Tinjauan Sistem Ekonomi Syariah*”, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam Vol 3 No.3, 2015.

Sumitro, Warkum,” *Asas – asas Perbankan Islam dan Lembaga Terkait*”, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2004.

Sutedi, Adrian, “ *Tindak Pidana Pencucian Uang*”, Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2008.

Tim Penerjemah Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya* , Surabaya: Mekar Surabaya, 2004

Umam, Khatibul, Setiawan Budi Utomo, “ *Perbankan Syariah Dasar – Dasar dan Dinamika Perkembangan di Indonesia* “, Jakarta : Rajawali Pers , 2017.



Umam, Setiawan Budi Utomo, “ *Perbankan Syariah Dasar – Dasar dan Dinamika Perkembangan di Indonesia* “, Jakarta : Rajawali Pers , 2017.

Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Undang No. 25 Tahun 2003 Tentang TTPU, Pasal 3 angka 1

Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, “ *Pedoman Penulisan Skripsi*”,  
Lampung : UIN Raden Intan,2017.

Widiyon, Try, “*Aspek Hukum Oprasional Transaksi Produk Perbankan di Indonesia*”, (Bogor : Ghalia Indonesia), 2006.

Wibawa, Iskandar,” *Cyber Money Laundering* “, Jurnal Yudisia, Volume 8  
Nomor 2, Desember 2017.

